



PEMERINTAH
KABUPATEN
SLEMAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

bkad@slemankab.go.id 

bkad.slemankab.go.id 

0274 866039 

Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman 



PEMERINTAH
KABUPATEN
SLEMAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Integritas,
Kepuasan, Cipta, Berkualitas, Kolaborasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

bkad@slemankab.go.id

bkad.slemankab.go.id

0274 866039

Jl. Parasamya Beran Tludadi Sleman

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman 2024”**.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai salah satu entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah barang tentu wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Sleman, 12 Februari 2025
Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



Dra. TINA HASTANI, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19700429 199603 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	7
DAFTAR GAMBAR	8
IKHTISAR EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Profil Singkat Badan Keuangan dan Aset Daerah	11
1.2 Isu Strategis	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2024	26
2.1.1 Sasaran	31
2.1.2 Strategi	32
2.2 Indikator Kinerja Utama	34
2.3 Perjanjian Kinerja BKAD	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	36
3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama	37
3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	39
3.2 Analisis Pengukuran Kinerja Utama	40
3.2.1 Penghitungan Dalam Pengukuran Kinerja	40
3.2.2 Pengukuran Kinerja IKU dan Perjanjian Kinerja	41
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	53
3.4 Analisis Program/Kegiatan	57
3.5 Capaian Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan”	90
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2024	93
4.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024	94

A. Tindak Lanjut LHE KemenpanRB.....	94
B. Tindak Lanjut LHE Inspektorat Kabupaten	95
4.3 Langkah Strategis BKAD dalam Meningkatkan Kinerja Pada Masa Mendatang	96
LAMPIRAN	97
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	98
Lampiran 2 Dokumen Perencanaan Level Perangkat Daerah	99
Lampiran 3 RKPD 2024 (batang tubuh dan uraian target perangkat daerah)...	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pernyataan tujuan pada Renstra BKAD Kab Sleman Tahun 2021-2026	26
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan	31
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran	31
Tabel 2.4 Target dan Perubahan atas Target Indikator Kinerja Utama	35
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BKAD 2024	35
Tabel 3.1 Daftar Indikator Kinerja Utama BKAD	37
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama BKAD	38
Tabel 3.3 Realisasi Perjanjian Kinerja	39
Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Target Jangka Menengah	43
Tabel 3.5 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Perubahan Target 2025.....	43
Tabel 3.6 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2024.....	43
Tabel 3.7 <i>Benchmarking</i> Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah DIY dan Nasional Tahun 2024	45
Tabel 3.8 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Target Jangka Menengah ..	48
Tabel 3.9 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Perubahan Target 2025	48
Tabel 3.10 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024	48
Tabel 3.11 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Predikat AKIP Berdasarkan Target Jangka Menengah	51
Tabel 3.12 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Predikat AKIP Berdasarkan Perubahan Target 2025	51
Tabel 3.13 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Predikat AKIP Tahun 2021-2024.....	51
Tabel 3.14 Tujuan dan/atau Sasaran dalam IKU dan PK	53

Tabel 3.15 Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66
Tabel 3.16 Realisasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah	78
Tabel 3.17 Realisasi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024	83
Tabel 3.18 Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024	88
Tabel 3.19 Target dan Realisasi Penyaluran Dana Penguatan Modal Tahun 2024	90
Tabel 3.20 Pengelolaan Dana Penguatan Modal	92
Tabel 4.1 Matrik Tindak Lanjut LHE KemenpanRB	94
Tabel 4.2 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai PNS BKAD	23
Grafik 1.2 Pegawai Berdasarkan Golongan	24
Grafik 1.3 Pegawai Berdasarkan Pendidikan	24
Grafik 3.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Sleman Tahun 2021-2024.....	44
Grafik 3.2 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah per Dimensi	45
Grafik 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sd 2024.....	49
Grafik 3.4 Perolehan Predikat AKIP BKAD Tahun 2021-2024.....	52
Grafik 4.1 Capaian Kinerja BKAD Tahun 2021 s.d 2024	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah	21
Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Stadion Maguwoharjo	22
Gambar 1.3 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal	22
Gambar 3.1 Ruang Pelayanan BKAD	50
Gambar 3.2 Sosialisasi Sistem Kerja Baru	61
Gambar 3.3 Ruang Pelayanan BKAD.....	64
Gambar 3.4 Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan RAPBD TA 2024.....	69
Gambar 3.5 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman	74
Gambar 3.6 <i>High Level Meeting</i> Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	75
Gambar 3.7 Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	77
Gambar 3.8 Penyimpanan Barang Milik Daerah Rusak Berat	82
Gambar 3.9 Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Evaluasi Capaian dan Konfirmasi Target Retribusi 2025	85
Gambar 3.10 Sosialisasi Penyelenggaraan Reklame	86
Gambar 3.11 Intensifikasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	87
Gambar 3.12 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Jurusita Pajak Kabupaten Sleman	88

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahunan. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BKAD dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran. Perjanjian Kinerja antara Kepala BKAD dengan Bupati, memuat pertanggungjawaban program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja BKAD dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk evaluasi internal dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 meliputi: capaian kinerja indikator indeks pengelolaan keuangan daerah 97,28%, Indeks Kepuasan Masyarakat 103,97% dan predikat AKIP 100%.

Pengukuran kinerja juga membandingkan (*benchmarking*) antara data capaian kinerja tahun 2024 dengan data capaian kinerja Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan data capaian kinerja Nasional, sepanjang datanya tersedia.

LKjIP ini turut menginformasikan program yang mendukung tujuan/sasaran, realisasi anggaran, faktor yang mempengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK, berikut bukti pendukung berupa dokumentasi atas kegiatan.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa dari 3 (tiga) tujuan/sasaran, 2 (dua) tercapai efisien. Dua tujuan/sasaran yang tercapai efisien ini mendapatkan dukungan dengan adanya regulasi Surat Keputusan Bupati Nomor 70.1/Kep.KDH/A/2015 tentang Indikator Kinerja Pelayanan Publik serta adanya kana-kanal aduan masyarakat.

Adanya capaian kinerja yang masih perlu ditingkatkan, yakni tujuan/sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sehubungan dengan capaian kinerja 97,28% dengan indeks B. Hal ini disebabkan oleh/dapat diberikan penjelasan bahwa capaian indikator dimaksud tidak tercapai dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni indeks A. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan kas dan setara kas (SiLPA) sehingga berpengaruh pada solvabilitas jangka pendek.

Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya, ditindaklanjuti secara berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan paa tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Profil Singkat Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan, bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang penunjang keuangan yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan;
- 4) Bidang Penagihan dan Pengembangan;
- 5) Bidang Perbendaharaan;
- 6) Bidang Anggaran;
- 7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- 8) Bidang Aset
- 9) Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Stadion Maguwoharjo
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

A. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan, bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
- c) Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
- e) Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

a) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- c) Pelaksanaan urusan umum.
- d) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan urusan keuangan.
- f) Pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- g) Pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi.
- h) Pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- i) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- j) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi, dan
- k) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d) Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan.
- e) Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f) Pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi dan pengaduan.
- g) Pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.
- c) Pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- d) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi.
- e) Pelaksanaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah.
- f) Pelaksanaan penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- g) Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah.
- h) Pelaksanaan pengawasan wajib pajak daerah.
- i) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.
- j) Pelaksanaan administrasi benda berharga.
- k) Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.
- l) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

d. Bidang Penagihan dan Pengembangan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.

- d) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- e) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
- f) Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah.
- g) Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah.
- h) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah.
- i) Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

e. Bidang Perbendaharaan

a. Tugas

Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan pengelolaan belanja daerah
- d) Pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja daerah
- e) Pelaksanaan penatausahaan kas daerah.
- f) Pelaksanaan pengendalian kas daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

f. Bidang Anggaran

a. Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah.
- c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.

- d) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan.
- e) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah.
- f) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah.
- g) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah.
- i) Penyusunan dokumen penyediaan dana dan anggaran kas.
- j) Penyusunan informasi penganggaran daerah.
- k) Penyusunan peraturan penganggaran daerah.
- l) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah.
- m) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a) Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b) Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
- e) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah.
- f) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- g) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah.
- h) Pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah.

- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

h. Bidang Aset

a) Tugas

Melaksanakan dan membina perencanaan dan pengadaan aset, pemanfaatan dan pengamanan aset dan penatausahaan dan pengendalian aset.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah.
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- d) Pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- e) Penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- f) Pengurusan status hukum barang daerah.
- g) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- h) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.
- i) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- j) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- k) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
- l) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
- m) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- n) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah.
- o) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Unit Pelaksana Teknis Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

(1)UPTD Stadion Maguwoharjo

UPT Stadion Maguwoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan aset Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga lainnya.

b. Fungsi

- a)Penyusunan rencana kerja;
- b)Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olah raga lainnya;
- c)Pelayanan penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Klebengan, Gedung Olah Raga Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- d)pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- e)pelaksanaan usul rehab atau pembangunan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- f) pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;

- g) pelaksanaan keamanan internal sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- h) pemasaran dan kerjasama penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- i) pelaksanaan ketatausahaan;
- j) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Stadion Maguwoharjo terdiri dari:

1. Kepala UPTD

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

1. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sesuai dengan ketrampilan/keahlian.

(2) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah bidang pengelolaan dana penguatan modal.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal;
- c) pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana penguatan modal;
- d) pelayanan informasi dana penguatan modal;
- e) pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;
- f) pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal;
- g) pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal;
- h) pelaksanaan ketatausahaan;
- i) evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri dari:

a. Kepala UPTD

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

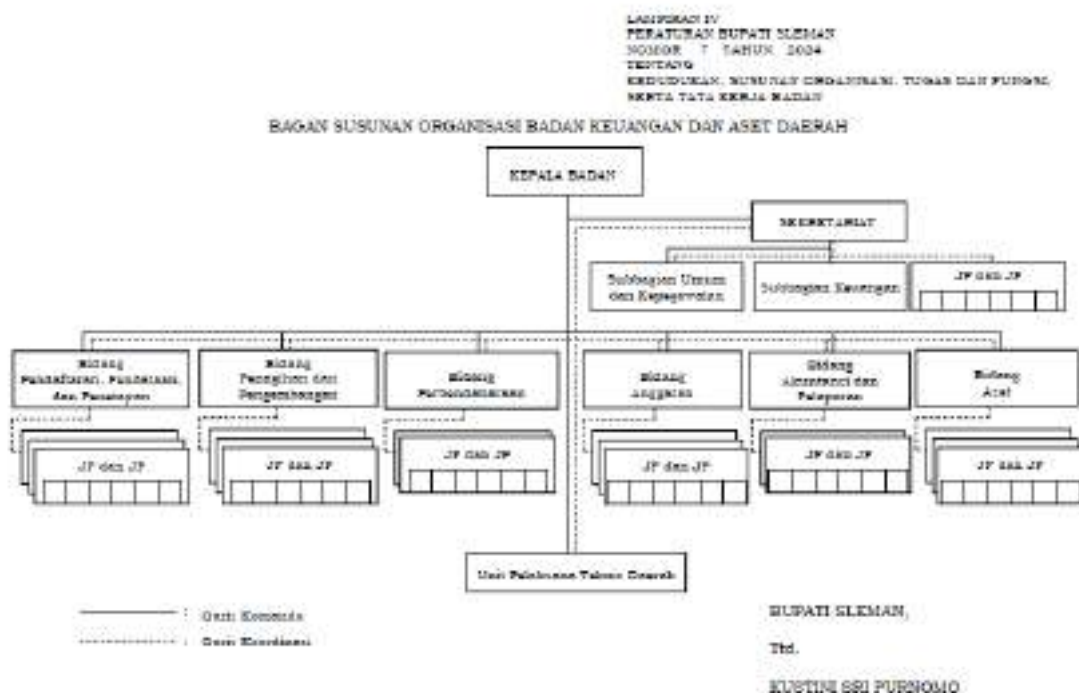
Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi.

Fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

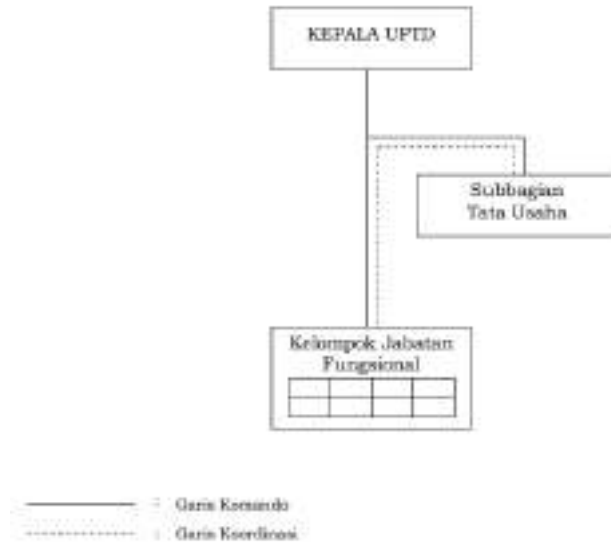
c. **Kelompok Jabatan Fungsional** melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sesuai dengan keahlian.



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 38.25 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO

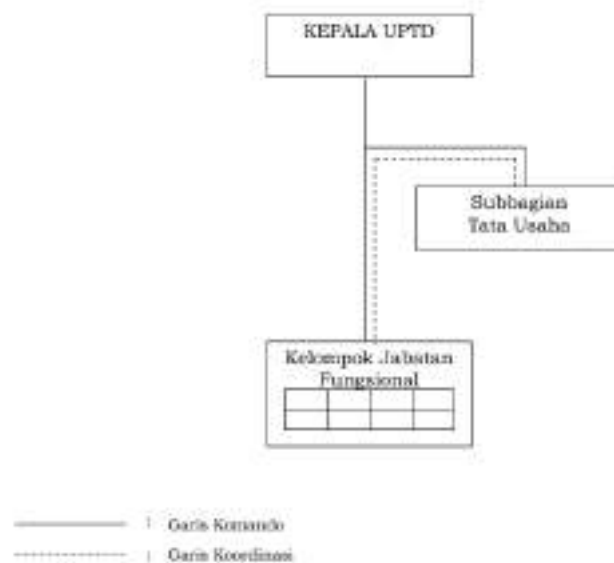
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO



Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 38.24 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL



Gambar 1.3 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

B. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh sumberdaya manusia / pegawai dengan beberapa klasifikasi. Sampai dengan Desember 2024 total sumber daya manusia (PNS) di BKAD tercatat 83 orang. Pegawai berdasar jenis kelamin terdiri atas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang (47%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sejumlah 44 orang (53%).

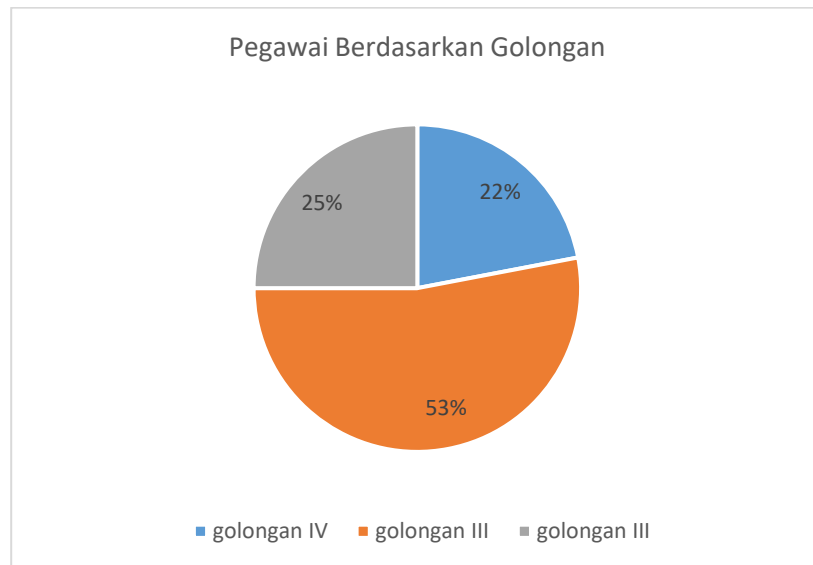
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai PNS BKAD



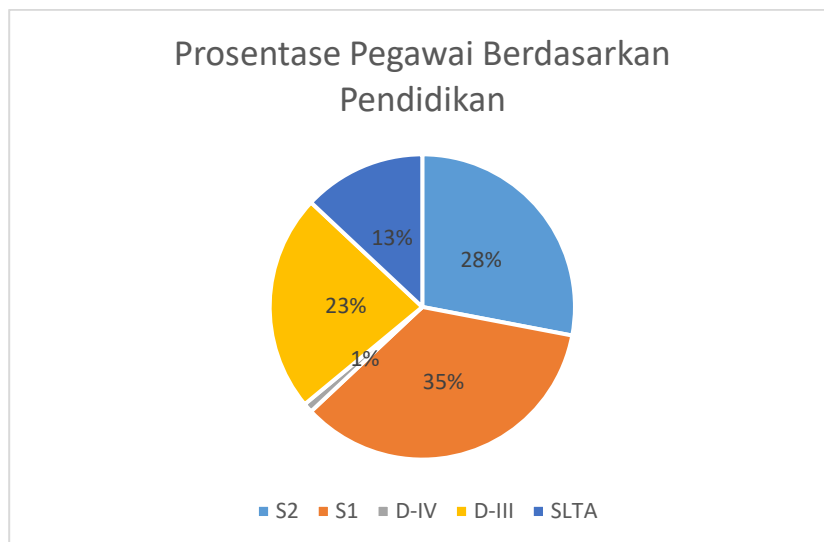
Jumlah pegawai menurut golongan terdiri dari Golongan IV berjumlah 18 orang (22%), Golongan III berjumlah 44 orang (53%), dan Golongan II berjumlah 21 orang (25%). Sedangkan berdasar klasifikasi pendidikan, jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 berjumlah 23 orang (28%), S-1 berjumlah 29 orang (35%), D-IV berjumlah 1 orang (1%), D-III berjumlah 19 orang (23%), SLTA berjumlah 11 orang (13%), SLTP berjumlah 0 orang (0%), dan SD berjumlah 0 orang (0%).

Jumlah pejabat struktural sebanyak 14 orang yang terdiri dari 6 pejabat laki-laki dan 8 pejabat perempuan. Jumlah pejabat struktural tersebut meliputi 1 pejabat eselon IIb, 1 pejabat eselon IIIb, 6 pejabat eselon IIIa, 4 pejabat eselon IVa dan 2 pajabat eselon IVb.

Grafik 1.2 Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.3 Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sedangkan pejabat fungsional yang ada di BKAD berjumlah 16 Yang terdiri dari 2 orang Arsiparis (Perempuan), 1 orang Perencana Ahli Muda (perempuan), 1 Penilai Pemerintah (laki-laki) dan 12 Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 8 orang Perempuan.

1.2. Isu Strategis

Berdasarkan Aspek Strategis sebagaimana diuraikan diatas BKAD memiliki aspek strategis yakni menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka menjawab isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2021-2026 (RPJMD 2021-

2026). Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Keuangan, yakni: tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.

Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam masa 5 (lima) tahun, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”. BKAD sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sleman. Peran strategis tersebut yakni mengimplementasikan langkah yang diperlukan melalui misi “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”.

Misi tersebut dilaksanakan melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2024

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan misi, (nama perangkat daerah) telah menyusun Renstra Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

Pada Renstra BKAD Kabupaten Sleman telah ditetapkan tujuan utama, yaitu Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah.

Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan; isu-isu strategis BKAD Kabupaten Sleman; serta tugas dan fungsi; dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra (nama perangkat daerah) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.1 Pernyataan tujuan pada Renstra BKAD Kab Sleman Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan public perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BKAD	Penyusunan dokumen perencanaan BKAD tepat waktu
			Penyusunan laporan pencapaian realisasi fisik dan keuangan BKAD tepat waktu
			Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dan program BKAD

Visi : Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan BKAD	Pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan BKAD sesuai dengan peraturan yang berlaku
			Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, pengelola keuangan, pengelola barang untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu
		Mengoptimalkan teknologi informasi dan social media untuk meningkatkan pelayanan BKAD	Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan BKAD
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan SOP pengelolaan keuangan dan aset daerah, standar pelayanan dan maklumat pelayanan
		Meningkatkan pelayanan kesekretariatan	Membuat dan mengelola dokumen penjaan kepegawaian
			Fasilitasi hak-hak kepegawaian
			Fasilitasi penyediaan sarana kerja dan pemeliharaan
			Pengelolaan dokumen dan arsip BKAD
		Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	Melakukan analisis kebutuhan diklat dan workshop
			Meningkatkan kualitas pelayanan penyajian data melalui website
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD	Menyusun dokumen APBD tepat waktu yang didukung dengan petunjuk pelaksanaan dan standar penyusunan
			Mengeluarkan instruksi anggaran dan menyusun jadwal pencermatan

Visi : Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkan koordinasi antara pokja dengan DPRD, Pemprov dan Pemerintah Pusat
			Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan tatakelola penyusunan APBD
		Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah	Menganalisis kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen perbendaharaan daerah yang terdiri dari analisis dokumen permohonan dana dari perangkat daerah (SPM/SPP
			Penerbitan SPD dan SP2D
			Mengoptimalkan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan penatausahaan keuangan daerah
			Konfirmasi dan sinkronisasi pencairan dana (SP2D) dengan Bank Kasda setiap saat
			Rekapitulasi pajak penghasilan setiap bulan (SPT Masa) dan tahunan (SPT tahunan)
			Meningkatkan koordinasi dengan DJPK, BPJS dan PT. Taspen dan Bank Kasda
			Pelaporan penyerapan dana transfer
			Verifikasi dokumen kontrak
			Meningkatkan pengelolaan uang kas daerah
			Meningkatkan pengelolaan dana hibah dan bansos meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi
			Peningkatan pengelolaan dana penguatan modal
		Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah	Verifikasi dan validasi SPJ
			Penerapan prosedur akuntansi dan pelaporan
			Pengiriman SPJ dari Perangkat Daerah tepat waktu

Visi : Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisasi kesalahan SPJ
			Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD
			Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi penerapan accrual basis
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, Laporan Keuangan Daerah dan Laporan realisasi APBD tepat waktu
			Akurasi data realisasi APBD yang berasal dari APBD
			Meningkatkan koordinasi dengan Bank Kasda dalam rangka pengelolaan kas daerah
			Meningkatkan koordinasi intensif dengan inspektorat dan BPK untuk meraih dan mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
		Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang berbasis accrual
			Pemeliharaan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
		Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyusunan draf regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan legal drafting yang berlaku
			Penyampaian aturan baru atau perubahan aturan tentang pengelolaan keuangan dan aset kepada pemangku kepentingan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah	Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pengelola BLUD
		Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah	Penyusunan dokumen rencana pengadaan
			Penyusunan dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah
			Inventarisasi dan rekonsiliasi barang milik daerah termasuk sediaan

Visi : Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Penelusuran dan penyelesaian status barang milik daerah (kendaraan, tanah dan bangunan)
			Pengamanan barang milik daerah
			Peningkatan manajemen barang milik daerah dan Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah
			Melaksanakan proses penghapusan aset sesuai usulan Perangkat Daerah
			Memfasilitasi pemeliharaan aset daerah (kendaraan dan bangunan)
			Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga
		Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak	Penerapan peraturan pusat tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
			Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi secara tepat waktu dan jumlah
		Intensifikasi PAD	Melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak dan retribusi daerah
			Melakukan pemantauan dan pembinaan wajib pajak daerah
			Menyusun kajian potensi pajak daerah
			Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah
			Pembayaran pajak panutan
			Melakukan penelitian SSPD dan BPHTB
			Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi data, kemudahan dan kecepatan pelayanan
		Ekstensifikasi Pajak Daerah	Melakukan pendaftaran wajib pajak baru
			Kerjasama dengan instansi yang memiliki kewenangan perijinan untuk integrasi data
		Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah	Up date sistem pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah
			Peningkatan kompetensi petugas pajak daerah
			Melakukan pemutakhiran data subjek pajak dan objek pajak secara periodic
		Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD	Memfasilitasi pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat

Visi	Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong		
Misi 1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Pemeliharaan aset daerah

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten	Indeks	B	B	B	B	B	B
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Angka hasil survey IKM yang dilakukan perangkat daerah	Indeks	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25

2.1.1. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran dan indikator sasaran sebagaimana yang ditetapkan pada Renstra BKAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten	Indeks	B	B	B	B	B	B

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Hasil Penilaian Inspektorat	Predikat	A	A	A	A	A	A

2.1.2. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, kebijakan, dan program-program. Adapun strategi-strategi tersebut adalah:

- Meningkatkan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKAD
- Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan BKAD
- Mengoptimalkan teknologi informasi dan sosial media untuk meningkatkan pelayanan BKAD
- Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
- Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD
- Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah
- Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah
- Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah
- Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan kepuasan wajib pajak
- Intensifikasi pajak daerah
- Ekstensifikasi Pajak Daerah

- q) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah
- r) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD

Pada tahun 2024, dilakukan perubahan atas target kinerja yang dipergunakan dalam Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan Tahun 2025. Perubahan dimaksud mendasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, merekomendasikan kepada Bupati Sleman agar memerintahkan Kepala OPD terkait untuk antara lain memperbaiki desain penyusunan indikator dan target pada *ultimate outcome*, program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih tepat, berorientasi hasil, dapat diukur secara objektif, jelas dan spesifik serta memperhatikan keselarasan subkegiatan dengan kegiatan dan program di atasnya.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti catatan dalam LHE tersebut dengan melakukan perbaikan dan/atau perubahan target kinerja pada Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Indikator Program yang telah terealisasi melebihi target pada tahun sebelumnya. Perbaikan dan/atau perubahan target dimaksud termuat dalam Surat Pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Sleman Nomor 050/444 tanggal 8 Mei 2024 selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 61, tanggal 25 Juli 2024) dan Peraturan Bupati.

Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa salah satu kondisi untuk merevisi atau melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yakni dalam hal terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adanya perubahan atas target kinerja tahun 2024 merupakan kondisi yang memenuhi kriteria tersebut, dan berdasarkan ketentuan dimaksud Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun Perubahan atas Perjanjian Kinerja berjenjang baik pada level

Pemerintah Kabupaten maupun perangkat daerah sampai dengan eselon IV sepanjang target kinerjanya mengalami perubahan.

Serangkaian tindak lanjut dalam perubahan atas target kinerja tahun 2024 merupakan upaya mewujudkan asas akuntabilitas kinerja dalam implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai instansi yang telah dianggap mampu memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil” (LHE KemenpanRB, 2024). Dengan demikian, penyampaian pengukuran kinerja dalam LKJIP Tahun 2024 ini memuat hasil penghitungan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap Perubahan atas Target Tahun 2024, dan Perubahan atas Target Tahun 2025, dalam rangka menindaklanjuti RKPD, Renja, dan Perjanjian Kinerja berdasarkan Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dimaksud.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut target pada indikator tujuan dan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator indeks pengelolaan keuangan daerah target semula B berubah menjadi A. Perubahan juga terjadi pada target indikator program yaitu program pengelolaan pendapatan daerah memiliki 2 (dua) indikator yaitu persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah. Indikator persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah target semula adalah 8,85% berubah menjadi 22,5% untuk tahun 2024. Tahun 2025 target semula 9,39% berubah menjadi 23%. Sedangkan target indikator indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah target semula pada tahun 2024 adalah 80,10 berubah menjadi 84,54. Pada tahun 2025 dari target 80,20 berubah menjadi 84,54.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama BKAD tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021-2026 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama BKAD Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target dan Perubahan atas Target Indikator Kinerja Utama
BKAD Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	A
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Nilai	81,75	81,75
3.	Predikat Akip	Indeks	A	A

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan diperlukan beberapa program pendukung. Berikut adalah program dan indikator kinerja program pendukung tujuan dan sasaran.

2.3. Perjanjian Kinerja BKAD 2024

Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2024 beserta Perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman dan perubahannya, dokumem Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2024 (termasuk perubahan atas APBD), sebagaimana tergambar dalam tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel. 2.5 Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2024

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Perubahan Target 2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah			1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	A
		1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	A
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	81,75
		2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3.	Predikat AKIP	A	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja atas realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. Analisis meliputi analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis pencapaian kinerja dalam LKjIP ini menyajikan hasil *benchmarking* antara realisasi capaian kinerja BKAD tahun 2024 dengan capaian pada tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja kabupaten/kota di wilayah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dengan capaian kinerja Pemerintah Pusat/Nasional sepanjang data yang relevan tersedia. Penyajian data benchmarking dilakukan dengan harapan dapat memotret secara komprehensif capaian di tingkat internal, regional dan nasional.

Analisis Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

3.1. Capaian Kinerja BKAD Tahun 2024

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran.

Berdasarkan perencanaan kinerja pada Bab II, terdapat 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang didukung dengan 3 (tiga) IKU dan 4 (empat) indikator Perjanjian Kinerja. Pengukuran realisasi kinerja BKAD dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerjanya termasuk dengan Perubahannya.

3.1.1 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026/Perubahan RKPD Tahun 2024/Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) IKU ampunan BKAD.

Daftar IKU meliputi rincian IKU, satuan, definisi operasional dan rumus penghitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Daftar Indikator Kinerja Utama BKAD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Nilai	indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Angka hasil survey IKM yang dilakukan BKAD
3.	Predikat AKIP	Indeks	predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan	Hasil penilaian dari inspektorat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran	

Sedangkan rincian data IKU meliputi satuan, target dan perubahannya, realisasi tahun sebelumnya, capaian kinerja (realisasi tahun 2024), target jangka menengah, dan tingkat kemajuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama BKAD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan Target		Realisasi				Capaian %	Target Jangka Menengah	Tingkat kemajuan (%0 berdasarkan Jangka Menengah)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perbaikan atas Target 2025
				2024	2025	2021	2022	2023	2024				
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B 74	A 80	A 80	B 56,99	B 74,84	A 80,06	B 77,83	97,28	B	102,41	97,28
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indek	81,75	81,75	82	82,26	83,03	81,50	85,00	103,97	82,25	103,34	103,65
3.	Predikat AKIP	Nilai	A (84)	A (84)	A (85)	A (84)	BB (76,95)	A (84)	A (84)	100,00	A	97,67	98,82

Analisis capaian kinerja berdasarkan data dalam Tabel 3.1.2. Rangkuman capaian kinerja IKU BKAD hingga 4 (empat) tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, bila diperhitungkan secara rata-rata keseluruhan, telah mengalami tingkat kemajuan capaian indikator 101,31% bila dibandingkan dengan target jangka menengah, dan sebesar 98,86% bila dibandingkan dengan perubahan atas target tahun 2025.

Tingkat kemajuan terendah pada angka 97,67% (indikator predikat AKIP) dan tertinggi pada angka 102,41% (indikator indeks pengelolaan keuangan daerah) dalam hal dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, sedangkan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target Tahun 2025 tingkat kemajuan terendah pada angka 97,28% (indikator indeks pengelolaan keuangan daerah)

dan tertinggi pada angka 100,50% (indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah).

3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2024 beserta perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2024 beserta perubahannya.

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disajikan dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan membandingkan antara target kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2024, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Perjanjian Kinerja

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)
						Target	Perubahan Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	A	B (77,83)	97,28%
		1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	A	A (77,83)	97,28%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,75	81,75	85,43	101,43%

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)
						Target	Perubahan Target	Realisasi	
	perangkat daerah								
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat	A	A	A	100%

3.2. Analisis Pengukuran Kinerja

3.2.1 Penghitungan Dalam Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan/atau sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman.

Penghitungan persentase Capaian Kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut:

- a. untuk kinerja indikator yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:**

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi tahun 2024}}{\text{Perubahan Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

atau

- b. untuk kinerja indikator yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk:**

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{Perubahan Target Tahun 2024} - \text{Realisasi tahun 2024}}{\text{Perubahan Target tahun 2024}} \times 100\%$$

Analisis pengukuran kinerja memuat realisasi IKU dan realisasi indikator Perjanjian Kinerja meliputi data realisasi, capaian kinerja dan tingkat kemajuan dari setiap Indikator Kinerja Utama tahun 2024. Kompilasi hasil analisis pengukuran kinerja terhadap setiap indikator tujuan dan indikator sasaran sebagai berikut:

Penghitungan persentase Tingkat Kemajuan:

- a. bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (*de jure*):

$$\text{Tingkat Kemajuan versi 1} = \frac{\text{Realisasi tahun 2024}}{\text{Target RPJMD Tahun 2026}} \times 100\%$$

- b. bila dibandingkan dengan Perubahan Target Tahun 2025 (sebagai target akhir dalam periode RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 *de facto*):

$$\text{Tingkat Kemajuan versi 2} = \frac{\text{Realisasi tahun 2024}}{\text{Perubahan Target Tahun 2025}} \times 100\%$$

3.2.2. Pengukuran Kinerja IKU dan Perjanjian Kinerja

Tujuan 1 “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”

Sasaran 1 “Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”

3.2.2.1 Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi operasional Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 3 (tiga) kategori hasil pengukuran yaitu: baik (A); perlu perbaikan (B); dan sangat perlu perbaikan (C). untuk mencapai hasil pengukuran, terdapat 6 (enam) dimensi yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Mengukur kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran, mulai dari dokumen RPJMD dinilai kesesuaian nomenklatur programnya dengan dokumen RKPD. Dokumen RKPD dinilai kesesuaiannya dengan dokumen KUA PPAS. Dokumen KUA PPAS dinilai kesesuaian nomenklatur dan pagunya dengan dokumen APBD.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Mengukur pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20%, untuk fungsi Kesehatan minimal sebesar 10% di luar anggaran gaji, dan alokasi untuk infrastruktur dari dana transfer serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengukur ketepatan waktu dan keteraksesannya dalam mempublikasikan dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah

selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis dokumen yang harus dipublikasikan. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan, dokumen penganggaran pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan opini BPK.

4. Penyerapan Anggaran

Mengukur penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.

5. Kondisi Keuangan Daerah

Mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif.

Indeks dimensi kondisi keuangan daerah juga dilihat dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan daerah, yakni:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. fleksibilitas keuangan;
- c. solvabilitas operasional;
- d. solvabilitas jangka pendek;
- e. solvabilitas jangka panjang; dan
- f. solvabilitas layanan.

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pengukuran adalah perolehan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Indikator Kinerja Utama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target indikator A dan realisasi B. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 97,28, dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 102,41%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 97,28 %.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	A	B (77,83)	97,28	102,41	B (76)

Tabel 3.5 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Perubahan Target 2025

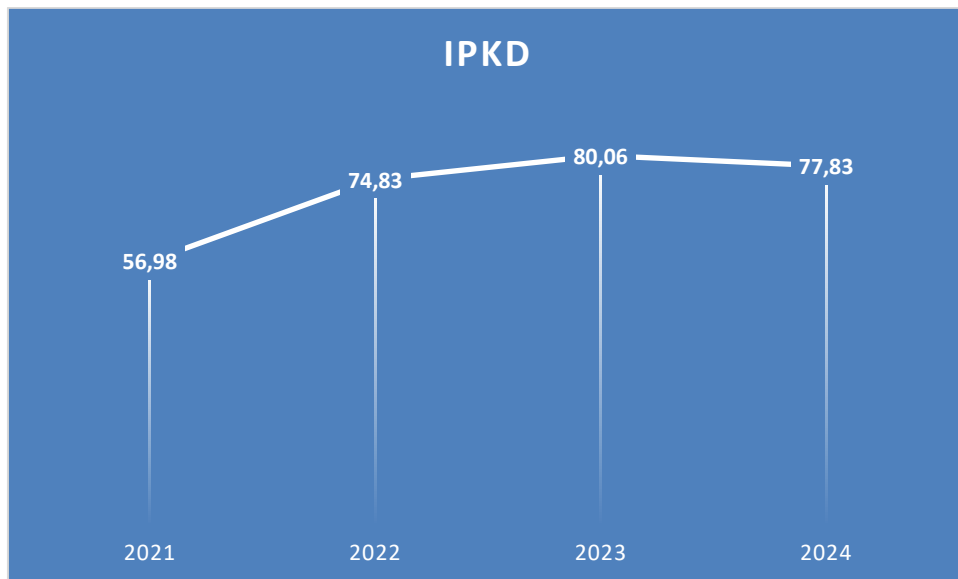
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2025	Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	A	B (77,83)	97,28	97,28	A

Tabel 3.6 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B (56,99)	B (74,84)	A (80,06)	B (77,83)	102,41	A (76)

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman mengalami penurunan, sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.1 sebagai berikut:

Grafik 3.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Sleman Tahun 2021-2024

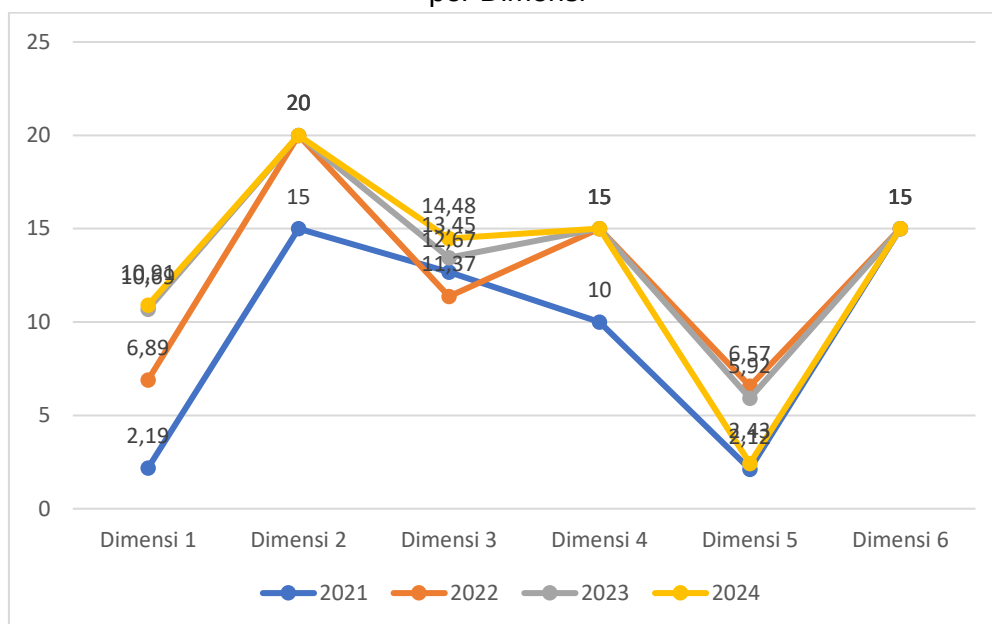


Indeks pengelolaan keuangan yang dilakukan pengukurannya pada tahun 2024 menunjukkan hasil kenaikan pada dimensi 1, dimensi 2 dan dimensi 3. Pada dimensi 4 dan dimensi 6 perolehan nilai tetap. Sedangkan pada dimensi 5 terjadi penurunan.

Dimensi 5 mengukur kondisi keuangan daerah dengan mengacu pada 6 (enam) indikator yaitu: 1) Kemampuan keuangan daerah, 2) fleksibilitas keuangan, 3) solvabilitas operasional, 4) solvabilitas jangka pendek, 5) solvabilitas jangka Panjang, dan 6) solvabilitas layanan. Penurunan terjadi pada ratio solvabilitas jangka pendek. Ratio solvabilitas jangka pendek diperoleh dengan cara menghitung saldo kas dan setara kas (SiLPA) ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Pada tahun yang diukur dan tahun sebelumnya tidak ada investasi jangka pendek, sehingga ratio hanya dipengaruhi oleh jumlah kas dan setara kas (SiLPA) dan jumlah kewajiban jangka pendek. Terjadi penurunan jumlah kas dan setara kas (SiLPA) pada tahun pengukuran, sedangkan jumlah kewajiban jangka pendek sebagai faktor pembagi mengalami kenaikan, sehingga diperoleh ratio solvabilitas jangka pendek yang menurun dibanding tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah per dimensi sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2. berikut:

Grafik 3.2 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah per Dimensi



Tabel 3.7 *Benchmarking* Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah DIY dan Nasional Tahun 2024

Benchmarking Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024	
Instansi	Capaian
Kabupaten Sleman	77,83
Kota Yogyakarta	74,27
Kabupaten Bantul	75,14
Kabupaten Gunungkidul	73,19
Kabupaten Kulon Progo	77,88
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	86,76
Rata-rata nasional kluster tinggi	68,00

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024

Faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Kemampuan SDM menguasai teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- Ketepatan waktu penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Terdapat 29 jenis dokumen yang dituntut tepat waktu baik dalam penetapan maupun publikasi. Dokumen yang disusun mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, laporan keuangan

baik pemerintah kabupaten maupun BUMD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

- c) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan *spending mandatory* dalam pengalokasian belanja pada APBD. Spending mandatory tersebut adalah alokasi APBD untuk belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, infrastruktur dan SPM.
- d) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengatur indikator kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu indikator pemberian tambahan penghasilan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati tersebut mendorong perangkat daerah untuk merealisasi anggaran sebagaimana telah dijadwalkan pada anggaran kas yang disusun.
- e) Adanya supervisi dari pemerintah pusat. Supervisi tersebut kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemenuhan beberapa indikator pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan, akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD yang sangat berpengaruh pada pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.
- f) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) oleh Komisi Informasi Daerah mendorong meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kegagalan pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Sistem pengelolaan keuangan menggunakan dobel sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendali teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan.
- b) Adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan dalam perjalanan waktu antara penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang

berpengaruh pada tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

- c) Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan.

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap tahapan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.
- b) Data-data yang telah dientrikan pada sistem pusat diimpor ke sistem keuangan daerah selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan maupun untuk monitoring dan evaluasi.
- c) Menyesuaikan peraturan-peraturan akibat perubahan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Tujuan 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah”

3.2.2.2 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi operasional Indeks Kepuasan Masyarakat adalah indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Survey kepuasan masyarakat dilakukan 2 kali dalam setahun dengan menggunakan 2 (dua) jenis kuisisioner yaitu kuisisioner *standard* dan kuisisioner rapat. Survei dilaksanakan tiap semester pada tiap-tiap unit layanan. Pada semester pertama tahun 2024 atas pelayanan kepada pengguna jasa BKAD diperoleh indeks sebesar 85,82. Sedangkan dari hasil survei semester 2 (dua) diperoleh hasil indeks sebesar 84,18. Dari kedua hasil survei tersebut kemudian dijumlah dan dibagi 2 (dua) untuk menentukan indeks IKM BKAD sehingga menghasilkan indeks sebesar 85.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indikator 81,75 dan realisasi sebesar 85. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 103,97%, dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 103,34%, dan bila dibandingkan dengan Target tahun 2025 sebesar 103,65%.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,75	87,75	85	103,97	103,34	82,25

Tabel 3.9 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Perubahan Target 2025

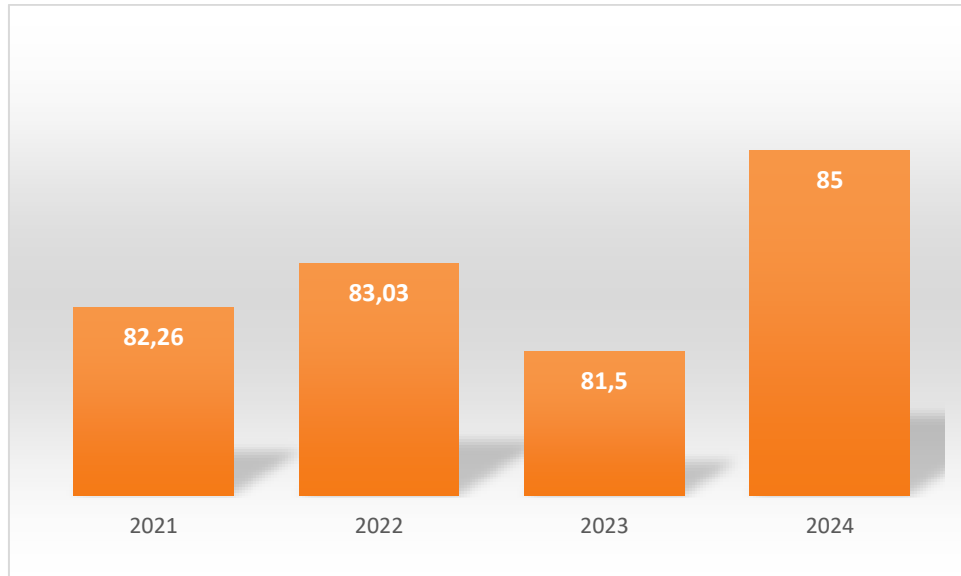
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target 2025	Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,75	81,75	85	103,97	103,65	82,25

Tabel 3.10 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,26	83,03	81,50	85,00	82,25	82

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada BKAD Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Jika dilihat dari periode tahun 2021 sampai dengan 2024 perolehan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BKAD meningkat dari 82,26 menjadi 85.

Grafik 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sd 2024



Faktor pendukung mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Teknologi informasi sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah untuk menggunakan jasa layanan, lebih valid dan lebih cepat penyelesaian prosesnya.
- Adanya komitmen pimpinan berikut jajarannya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
- Pengguna jasa yang telah bersedia menjadi objek *survey* kepuasan masyarakat, sehingga teknis pengambilan data IKM menjadi lebih mudah dan lancar.
- Adanya *survey* kepuasan pengguna layanan oleh pihak independen telah mendorong perangkat daerah untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan.
- Telah ditetapkan keputusan Bupati Nomor 70.1/Kep.KDH/A/2015 tentang Indikator Kinerja Pelayanan Publik mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik berupa saran dan prasarana maupun peningkatan kapasitas SDM bagian pelayanan.

Faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat:

- a) Terbatasnya ruang untuk memenuhi standar ruang pelayanan yang baik sehingga beberapa area belum terpenuhi (belum ada ruang laktasi, ruang bermain anak dan pojok baca).
- b) Tingkat pemahaman petugas pelayanan belum merata sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan.
- c) Kemampuan petugas dalam melayani masyarakat belum merata.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan/sasaran:

- a) Penataan ulang ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat pengguna layanan.
- b) Bimbingan teknis bagi petugas terkait publik *speaking* untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan informasi terkait pelayanan.
- c) Bimbingan teknis bagi petugas pelayanan terkait pelayanan prima dan peningkatan integritas petugas.



Gambar 3.1 Ruang Pelayanan BKAD

Sasaran 2 “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

3.2.2.3. Indikator Predikat AKIP

Definisi operasional Predikat AKIP adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Predikat AKIP perangkat daerah diberikan oleh

Inspektorat Kabupaten sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian PAN RB.

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor 700/13/F perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, diperoleh nilai sebesar 84 dengan predikat A kategori “Memuaskan”.

Indikator Kinerja Utama Predikat AKIP dengan target indikator A dan realisasi A dengan nilai 84. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 97,67%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 98,82%.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Predikat AKIP Berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Predikat AKIP	Predikat	A	A	A	100%	97,67	A

Tabel 3.12 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Predikat AKIP Berdasarkan Perubahan Target 2025

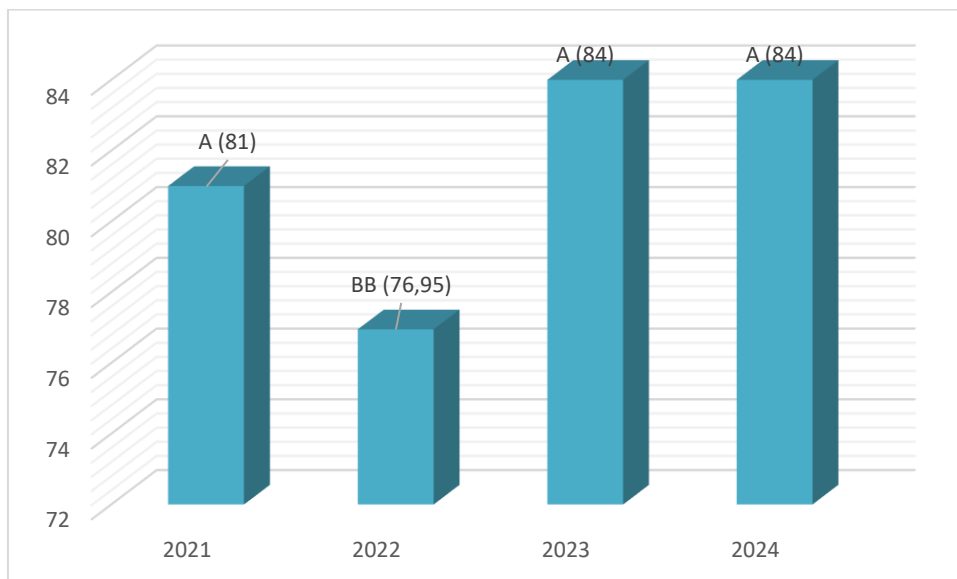
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target 2025	Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Predikat AKIP	Predikat	A	A	A	100	103,65	A

Tabel 3.13 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Predikat AKIP Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Predikat AKIP	Predikat	A (84)	BB (76,95)	A (84)	A (84)	A	A

Berdasarkan Tabel 3.13 dapat terlihat bahwa indikator AKIP BKAD Kabupaten Sleman tercapai sesuai target. Jika dilihat dari periode tahun 2021 sampai dengan 2024 predikat AKIP BKAD diperoleh hasil fluktuatif sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

Grafik 3.4 Perolehan Predikat AKIP BKAD Tahun 2021-2024



Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Predikat AKIP:

- Kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja.
- Komitmen pimpinan beserta jajaran.
- Ketersediaan data yang cukup sehingga memperlancar upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan.
- Partisipasi masyarakat melalui kanal-kanal aduan sehingga mendorong meningkatkan akuntabilitas.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kegagalan pencapaian indikator Predikat AKIP:

- Sistem pengelolaan keuangan menggunakan dobel sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendali teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan yang telah direncanakan.
- Pelaksanaan beberapa evaluasi yang berhimpitan waktunya.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian sasaran:

- Meningkatkan koordinasi terkait implementasi sistem.
- Menyusun jadwal dengan lebih cermat.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program yang mendukung capaian Tujuan dan/atau Sasaran dalam IKU dan PK sebagai berikut:

Tabel 3.14 Tujuan dan/atau Sasaran dalam IKU dan PK

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2024			
						Capaian Kinerja	Anggaran (juta Rp)	Realisasi Anggaran (juta Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1.Program Pengelolaan keuangan daerah	97,28	516.715,15	507.583,34	98,23
					2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		6.672,94	5.530,19	87,81
					3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		19.307,65	18.914,87	97,96
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota	103,97	58.483,40	57.053,65	97,55
		2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota	100	36.786,40	34.716,79	93,37

Analisis efisiensi anggaran setiap Program sebagai berikut:

A. Tujuan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” / Sasaran “Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”.

Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 3 (tiga) program sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 507.583.341.429,00 dari anggaran sebesar Rp 91.770.447.742,01 atau setara dengan 98,21% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 98,21% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 97,28%, maka terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut. Namun dapat dijelaskan bahwa pada program pengelolaan keuangan daerah terdapat anggaran untuk bantuan keuangan, bagi hasil dan dana kedaruratan sebesar Rp 512.819.651.863,00 terealisasi sebesar Rp 503.912.076.935,00. Sehingga jika ketiga hal tersebut dikecualikan dari perhitungan maka realisasi keuangan adalah sebesar 93% terdapat efisien. Efisiensi penggunaan sumber daya bersumber dari:

- Belanja bahan cetak Rp 85.911.015,00
- Belanja makan dan minum rapat Rp 37.313.330,00
- Belanja jasa konsultasi Rp 94.800.000,00

BKAD untuk capaian kinerja indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang kurang signifikan memberikan dukungan terhadap capaian kinerja, dialihkan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan supporting capaian kinerja program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu untuk pelaksanaan diseminasi SIPD Penatausahaan yang akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2025.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp5.859.859.033,41 dari anggaran sebesar Rp 6.672.941.430,00 atau setara dengan 87,81% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 87,81% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 97,28%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari:

- Belanja jasa pengukuran tanah Rp 313.008.500,00
- Belanja jasa kantor (tagihan Listrik, air dan telpon) Rp 161.704.931,00
- Belanja pemeliharaan Rp 193.521.279,00

BKAD untuk capaian kinerja indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kurang signifikan memberikan dukungan terhadap capaian kinerja, dialihkan untuk kegiatan yang memberikan supporting capaian kinerja program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu untuk sewa Gedung untuk menyimpan aset. Hal ini dikarenakan BKAD tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan aset tarikan dari perangkat daerah.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 18.914.875.975,99 dari anggaran sebesar Rp 19.307.657.525,00 atau setara dengan 97,96% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 97,96% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 97,28%, maka terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut. Namun dapat dijelaskan bahwa pada program pengelolaan pendapatan daerah terdapat anggaran *mandatory* Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kalurahan dengan anggaran sebesar Rp 9.953.807.525,00 terealisasi sebesar Rp 9.953.783.525,00. Sehingga jika anggaran *mandatory* tersebut dikecualikan dari perhitungan maka realisasi keuangan adalah sebesar 95%% terdapat efisien. Efisiensi penggunaan sumber daya bersumber dari:

- Belanja bahan cetak Rp 80.119.538,00
- Belanja makan dan minum rapat Rp 46.397.234,00
- Belanja perjalanan dinas Rp 146.367.900,00

B. Tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat didukung 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Rp 57.053.650.464,00 dari anggaran sebesar Rp 58.483.403.514,00 atau setara dengan 97,55% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 97,55% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari:

- Belanja bahan habis pakai Rp 268.475.251,00
- Belanja perjalanan dinas Rp 133.798.997,00
- Belanja pengadaan kendaraan Rp 378.146.752,00
- Belanja jasa kantor (langganan) Rp 299.740.518,00
- Belanja bahan bakar minyak Rp 171.704.288,00

BKAD untuk capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam rangka mendukung efisiensi anggaran pada program/kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kurang signifikan memberikan dukungan terhadap capaian kinerja, dialihkan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan supporting capaian kinerja program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, antara lain:

- Perbaikan *layout* ruangan bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dan Sekretariat dalam rangka memudahkan akses pelayanan
- Perbaikan pintu otomatis ruang pelayanan
- Pembangunan kantin

C. Sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Capaian kinerja didukung 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung indikator Predikat AKIP sebesar Rp 34.716.797.278,15 dari anggaran sebesar Rp 36.786.404.136,00 atau setara dengan 94,37% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 94,37% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan

sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari belanja insentif sebesar Rp 1.127.991.810,35.

3.4. Analisis Program/Kegiatan

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat dari tercapainya 2 (dua) target indikator kinerja tujuan dan 2 (dua) target indikator kinerja sasaran, yang didukung oleh tercapainya indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian seluruh sasaran strategis sebanyak 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan. Sedangkan 1 (satu) sub kegiatan merupakan tugas pembantuan dana keistimewaan DIY yang pelaksanaannya sesuai dengan berita acara.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh sekretariat BKAD, didukung 5 (lima) kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar 95.269.807.650,00 terealisasi sebesar Rp 91.770.447.742,01 atau 96,32%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota ada 2 (dua) yaitu persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dan persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari perhitungan terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana kerja, baik pengadaannya maupun pemeliharaan atas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kerja meliputi gedung kantor, kendaraan dinas serta perlengkapan dan peralatan kantor. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari perhitungan terpenuhinya layanan administrasi perkantoran BKAD. Administrasi perkantoran terdiri dari layanan administrasi keuangan, layanan makan dan minum rapat, layanan koordinasi dan konsultasi, layanan langganan, layanan jasa keamanan dan kebersihan, layanan

administrasi kepegawaian dan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKAD.

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 60.273.935,00 terealisasi sebesar Rp 59.339.923,00 atau sebesar 98,45%.

Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dihitung jumlah dokumen yang disusun tepat waktu pada tahun 2024. Dokumen yang harus disusun terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi. Dokumen perencanaan terdiri dari dokumen perubahan rencana kerja tahun 2024 dan dokumen rencana kerja tahun 2025. Dokumen penganggaran terdiri dari dokumen perubahan rencana kegiatan (RKA Perubahan) anggaran tahun 2024, dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahun (RKA) tahun 2025, dokumen perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA Perubahan) tahun 2024 dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2025. Dokumen evaluasi terdiri dari laporan bulanan tahun 2024, laporan tahunan tahun 2023 dan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun 2024.

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah didukung 6 (enam) sub kegiatan. Keenam sub kegiatan yang mendukung kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 43.343.720,00 realisasi Rp43.047.995,00 (99,31%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah, terealisasi 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah (100 %).

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.762.440,00 realisasi Rp 1.736.143,00 (98,50%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA -SKPD, terealisasi 1 (satu) dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (100%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.091.600,00 realisasi Rp 2.002.912,00 (95,75%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, terealisasi 1 (satu) dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (100%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.349.900,00 realisasi Rp 2.315.355,00 (98,52%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD, terealisasi 1 (satu) dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (100%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.274.900,00 realisasi Rp 1.950.181,00 (85,72%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD, terealisasi 1 (satu) dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (100%)
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.451.375,00 realisasi Rp 8.347.337,00 (98,76%), sedangkan target output adalah 7 (tujuh) laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, terealisasi 7 (tujuh) laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (100%).
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah prosentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan semesteran dan laporan Barang Milik Daerah semesteran. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 35.556.557.201,00 terealisasi sebesar Rp 33.650.957.424,15 atau sebesar 94,64% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 34.889.834.001,00 realisasi Rp 33.045.124.535,15 (94,71%), sedangkan target output adalah 90 (sembilan puluh) orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, terealisasi 90 (sembilan puluh) orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (100%)

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 582.360.000,00 realisasi Rp 552.440.000,00 (94,86%), sedangkan target output adalah 3 (tiga) dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, terealisasi 3 (tiga) dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 84.363.200,00 realisasi Rp 83.392.889,00 (98,84%), sedangkan target output adalah 5 (lima) laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD, terealisasi 5 (lima) laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD (100%).

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dengan target 100% dan

teralisasi sebesar 100%. Adapun total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.169.573.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.006.439.931,06 atau sebesar 86,05%.

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Lokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terealisasi dari sub kegiatan dapat dilihat di lampiran 2.



Gambar 3.2 Sosialisasi Sistem Kerja Baru

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90% sehingga capaian 100%. Administrasi umum terdiri dari:

- 1) penyediaan komponen listrik
- 2) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) fasilitasi tamu dan perjalanan dinas
- 4) kebutuhan lainnya

Adapun total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.512.972.100,00 terealisasi sebesar Rp 2.065.109.895,00 atau sebesar 82,17% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah didukung dengan 6 (enam) sub kegiatan. Keenam sub kegiatan yang mendukung kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 78.087.600,00 realisasi Rp 57.974.930,00 (74,24%), sedangkan target output adalah 6 (enam) paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan, terealisasi 6 (enam) paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (100%)

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 636.301.500,00 realisasi Rp 575.954.307,00 (90,51%), sedangkan target output adalah 1 (satu) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, terealisasi 1 (satu) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (100%)

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 755.627.000,00 realisasi Rp 645.051.483,00 (85,36%), sedangkan target output adalah 1 (satu) paket bahan logistik kantor yang disediakan, terealisasi 1 (satu) paket bahan logistik kantor yang disediakan (100%)

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 350.000.000,00 realisasi Rp 229.314.382,00 (65,51%), sedangkan target output adalah 1 (satu) paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, terealisasi 1 (satu) paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (100%).

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 91.518.000,00 realisasi Rp 89.175.890,00 (97,44%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan fasilitasi kunjungan tamu, terealisasi 12 (dua belas) laporan fasilitasi kunjungan tamu (100%).

- **Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 601.438.000,00 realisasi Rp 467.639.003,00 (77,75%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, terealisasi 12 (dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd (100%).

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja dengan target 90% terealisasi sebesar 90% sehingga capaian 100%. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.129.636.450,00 terealisasi sebesar Rp 7.751.489.698,00 atau sebesar 95,34% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan. Kedua sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.129.636.450,00 realisasi Rp 7.751.489.698,00 (95,34%), sedangkan target output adalah 14 (empat belas) unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan, terealisasi 14 (empat belas) jenis unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (100%)

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Penunjang pelaksanaan tugas terdiri dari layanan surat menyurat, layanan penyediaan jasa langganan, layanan keamanan dan kebersihan kantor dan layanan umum lainnya. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 45.636.337.064,00 terealisasi sebesar Rp 45.313.769.735,00 atau sebesar 99,29% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang mendukung kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 126.000.000,00 realisasi Rp 118.001.195,00 (93,65%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa surat menyurat, terealisasi 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa surat menyurat (100%)

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 45.009.462.064,00 realisasi Rp 44.709.721.546,00 (99,33%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan terealisasi 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (100%)
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 500.875.000,00 realisasi Rp 486.046.994,00 (97,03%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan, terealisasi 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (100%)



Gambar 3.3 Ruang Pelayanan BKAD

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah terpelihara terealisasi sebesar 90% dari target 90% sehingga capaian 100%. Barang milik daerah terdiri dari kendaraan dinas, peralatan dan mesin, mebelair, gedung kantor dan barang milik daerah lainnya. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.580.457.900,00 terealisasi sebesar Rp 1.299.433.625,80 atau sebesar 82,21% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang

mendukung kegiatan pemeliharaan baran milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 609.312.000,00 realisasi Rp 415.170.976,00 (68,13%), sedangkan target output adalah 37 (tiga puluh tujuh) kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya, terealisasi 37 (tiga puluh tujuh) unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (100%)

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 195.550.000,00 realisasi Rp 146.319.756,00 (74,82%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, terealisasi 12 unit (dua belas) peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (100%)

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 775.595.900,00 realisasi Rp 737.942.893,00 (95,14%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, terealisasi 12 unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (100%)

h) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator kinerja adalah persentase pemenuhan layanan BLUD terealisasi sebesar 98% dari target sebesar 100%. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 624.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 623.847.510,00 atau sebesar 99,97% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan. Alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terealisasi sebagaimana ditampilkan pada lampiran 2.

**Tabel 3.15 Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100	100	100
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase dokumen laporan keuangan	100	100	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	90	90	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	90	90	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	100	100	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	90	90	100
Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	persentase pemenuhan layanan BLUD	100	100	100

Keberhasilan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memengaruhi capaian kinerja tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah” sebesar 103,97%, dan tercapainya target kinerja sasaran “Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 2 (dua) target kinerja indikator program yakni:

1. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.
2. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh ASN terhadap pelaksanaan program/kegiatan melalui penyusunan perencanaan, pengumpulan data, penyusunan laporan serta evaluasi secara berkala dalam rakor internal.
- b) Sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan penyelesaian tugas pokok dan fungsi.
- c) Teknologi informasi serta sosial media yang memudahkan akses informasi.

Meskipun demikian, terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan program, kegiatan dimaksud, yakni:

- a). Penggunaan system informasi keuangan ganda pada tahapan perencanaan dan penganggaran yaitu sistem daerah dan dari pusat. Pada Sistem yang menggunakan sistem dari pusat masih mengalami kelambatan pada jam kerja.
- b) Banyaknya evaluasi dengan indikator yang hampir sama dan dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat sebagai berikut:

- a) Melakukan entri di luar jam kerja sambil berkoordinasi dengan pengampu agar menyampaikan kepada pusat terkait permasalahan yang terjadi.

- b) Melakukan penjadwalan dengan lebih cermat sehingga evaluasi dapat terlaksana dengan baik

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah memiliki 4 (empat) indikator yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang dan sekretariat melalui 4 (empat) kegiatan. Keempat indikator tersebut adalah:

1. persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran daerah oleh bidang anggaran
2. persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah melalui kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah oleh bidang perbendaharaan
3. persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah oleh bidang akuntansi, dan
4. persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan melalui kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah oleh sekretariat.

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar Rp 516.715.147.337,00 terealisasi sebesar Rp 507.583.341.429,00 atau sebesar 98,23%. Program pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini indikator kinerjanya adalah persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen anggaran terdiri dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Raperda APBD dan Raperda PAPBD.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyerahan dokumen KUA PPAS kepada DPRD paling lambat minggu ke 2 (dua)

bulan Juli. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025 ditandatangani oleh Bupati Sleman dan Pimpinan DPRD pada tanggal 9 Juli 2024.

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Sedangkan penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Rancangan Perda APBD Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2025 dan rancangan perbup tentang penjabaran APBD ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.



Gambar 3.4 Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan RAPBD TA 2024

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.324.045.800,00 terealisasi sebesar Rp 2.103.023.215,00 atau sebesar 90,48% dari total anggaran yang dialokasikan. Kelima sub kegiatan yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 115.229.400,00 realisasi Rp 91.050.464,00 (79,01%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen KUA dan PPAS yang disusun, terealisasi 2 (dua) dokumen KUA dan PPAS yang disusun (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 68.196.000,00 realisasi Rp 35.700.765,00 (52,35%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun, terealisasi 2 (dua) dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun (100%).

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.405.000,00 realisasi Rp 12.096.750,00 (97,51%), sedangkan target output adalah 75 (tujuh puluh lima) RKA SKPD yang diverifikasi, terealisasi 75 (tujuh puluh lima) dokumen RKA SKPD yang diverifikasi (100%)

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.405.000,00 realisasi Rp 11.284.500,00 (90,96%), sedangkan target output adalah 75 (tujuh puluh lima) RKA SKPD yang diverifikasi, terealisasi 75 (tujuh puluh lima) dokumen RKA SKPD yang diverifikasi (100%)

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 31.950.000,00 realisasi Rp 28.445.011,00 (89,02%), sedangkan target output adalah 75 (tujuh puluh lima) DPA di verifikasi, terealisasi 75 (tujuh puluh lima) dokumen DPA SKPD yang diverifikasi (100%)

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 17.823.000,00 realisasi Rp 15.593.419,00 (87,49%), sedangkan target output adalah 75 (tujuh puluh lima) DPA perubahan di verifikasi, terealisasi 75 (tujuh puluh) dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.315.806.200,00 realisasi Rp 1.297.851.097,00 (98,63%), sedangkan target output adalah 2 (dua) peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, terealisasi 2 (dua) dokumen peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 130.155.700,00 realisasi Rp 128.666.107,00 (98,88%), sedangkan target output adalah 2 (dua) peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, terealisasi 2 (dua) dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 620.075.500,00 realisasi Rp 482.335.102,00 (77,78%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran, terealisasi 2 (dua) dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran (100%)

b) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Salah satu fungsi BKAD adalah sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) yang tugas utamanya adalah menyediakan dan melakukan pencairan dana atas beban rekening kas daerah sebagaimana diminta oleh Pengguna Anggaran. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan kinerja diukur dengan ketepatan waktu pencairan dan penatausahaan keuangan daerah. Dalam hal penatausahaan keuangan daerah termasuk pula mengatur ketersediaan dana sebagaimana diminta oleh pengguna anggaran, untuk keperluan belanja baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan. BUD sudah menjalankan fungsi penyediaan dana sesuai rencana/kebutuhan. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari data penerbitan SP2D selama tahun 2024 yang tepat

waktu. Selama tahun 2024 telah terbit SP2D sebanyak 9.763 SP2D dengan nilai pencairan Rp 3.109.161.000.283,84. Dalam penatausahaan keuangan daerah BKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan teknologi yang ada sehingga administrasi penatausahaan keuangan daerah lebih cepat dan lebih valid. Sistem Informasi Keuangan Daerah telah mengakomodir kebutuhan penatausahaan keuangan daerah yang secara *online* terhubung dengan Bank Kasda. BKAD selaku BUD telah memanfaatkan tanda tangan elektronik tersebut untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) *online* sehingga SP2D terbit tepat waktu sesuai dengan peraturan yaitu maksimal 2 (dua) hari.

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Penatausahaan keuangan meliputi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pengelolaan dana daerah. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 802.685.724,00 terealisasi sebesar Rp 779.623.612,00 atau sebesar 97,12% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah didukung dengan 7 (tujuh) sub kegiatan. Ketujuh sub kegiatan yang mendukung kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 87.291.000,00 realisasi Rp 86.370.150,00 (98,94%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah, terealisasi 12 (dua belas) dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah (100%)
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 207.249.150,00 realisasi Rp 197.052.867,00 (95,08%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen hasil pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan

SPD, terealisasi 2 (dua) dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD (100%)

- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 72.890.900,00 realisasi Rp 70.447.593,00 (96,64%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, terealisasi 12 (dua belas) dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana tranfer lainnya (100%)

- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 259.624.674,00 realisasi Rp 255.192.700,00 (98,29%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) dokumen hasil kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, terealisasi 12 (dua belas) dokumen hasil kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 46.130.000,00 realisasi Rp 45.380.938,00 (98,37%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Laporaan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran, terealisasi 12 (dua belas) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Laporaan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran

perhitungan fihak ketiga dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran (100%).



Gambar 3.5 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 129.500.000,00 realisasi Rp 125.179.364,00 (96,66%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait, terealisasi 1 (satu) dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait (100%)



Gambar 3.6 *High Level Meeting* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

c) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD terealisasi sebesar 100 persen dari target 100%. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Perhitungan indikator pada tahun 2024 adalah untuk mengukur penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2023 ditetapkan tanggal 3 Juni 2024. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 768.763.950,00 terealisasi sebesar Rp 755.907.407,00 atau sebesar 98,23% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan ini didukung dengan 4 (empat) sub kegiatan yang masing-masing alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output sebagai berikut:

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp74.733.000,00 realisasi Rp 71.293.350,00 (95,39%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, terealisasi 1 (satu) laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah (100%).

- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 512.411.550,00 realisasi Rp 504.324.587,00 (98,42%), sedangkan target output adalah 1 (satu) rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota, terealisasi 1 (satu) dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (100%)

- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 170.987.400,00 realisasi Rp 170.146,920,00 (99,50%), sedangkan target output adalah 1 (satu) kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah terealisasi 1 (satu) dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah (100%).

- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.632.000,00 realisasi Rp 10.142.550,00 (95,39%), sedangkan target output adalah 50 (lima puluh) orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan

dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota, terealisasi 50 (lima puluh) orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten (100%).



Gambar 3.7 Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

d) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dari total anggaran yang dikelola BKAD sebanyak 79,99% teralokasi untuk kegiatan ini. Jenis belanja yang dikelola pada kegiatan ini adalah belanja tidak terduga dan belanja transfer kepada pemerintah Desa. Hal ini mengingat fungsi BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menjadi lalu lintas uang masuk dan keluar. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 512.819.651.863,00 terealisasi sebesar Rp 503.994.787.195,00 atau sebesar 98,27%.

Kegiatan Didukung dengan 4 (empat) sub kegiatan. Keempat sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 47.540.000,00 realisasi Rp 32.710.260,00 (68,80%), sedangkan target output adalah 3

(tiga) Laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah, terealisasi 3 (tiga) Laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (100%).

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 397.985.064.293,00 realisasi Rp 397.504.904.212,00 (99,87%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, terealisasi 1 (satu) laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan (100%).

- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.915.622.161,00 realisasi Rp 14.169.125.700,00 (71,14%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak, terealisasi 1 (satu) laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak (100%).

- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 94.871.425.409,00 realisasi Rp 92.238,047.023.00 (97,22%), sedangkan target output adalah 3 (tiga) laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota, terealisasi 3 (tiga) laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten (100%).

Tabel 3.16 Realisasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	100	100	100
	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	100	100	100
	Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	100	100	100
	Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan	100	100	100
Kegiatan	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu yang	100	100	100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	100	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	100	100	100
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan	100	100	100

Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah memengaruhi capaian kinerja tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja tujuan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar 97,28%, dan capaian target kinerja sasaran “Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar 97,28%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 4 (empat) target kinerja indikator program yakni:

1. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.
2. Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.
3. Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.
4. Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk menyusun dokumen penganggaran. Penatausahaan dan pelaporan tepat waktu.

- b) Koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk sinkronisasi agenda daerah.
- c) Teknologi informasi serta sosial media yang memudahkan akses informasi.
- d) Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
- e) Adanya supervisi dari pemerintah pusat. Supervisi tersebut kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemenuhan beberapa indikator pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan, akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD.

Meskipun demikian, terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan program kegiatan dimaksud, yakni:

- a) Penggunaan system informasi keuangan ganda pada tahapan perencanaan dan penganggaran yaitu sistem keuangan daerah dan sistem keuangan yang dibuat pusat. Pada sistem yang menggunakan sistem dari pusat kendali sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
- b) Kemampuan SDM pengelola keuangan daerah belum merata.
Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat sebagai berikut:
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait sistem informasi keuangan.
 - Meningkatkan kapasitas kemampuan SDM pengelola keuangan daerah.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengelolaan barang milik daerah hanya didukung 1 (satu) kegiatan dengan nama yang sama yaitu pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan

penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A. Indikator ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah.

Target indikator persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A adalah sebesar 88% terealisasi sebesar 88% sehingga capaian 100%. Realisasi ini dihitung dari jumlah perangkat daerah yang memiliki kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sleman dikali 100%. Kategori tertib administrasi pengelolaan BMD adalah penyampaian dokumen administrasi pengelolaan BMD tepat waktu. Dokumen tersebut adalah berita acara rekonsiliasi bulanan, laporan semester 1 (satu) tahun n, laporan semester 2 (dua) tahun 2-1, RKBMD awal, RKBMD perubahan. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.672.941.430,00 terealisasi Rp 5.859.859.033,41 atau sebesar 87,81% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan pengelolaan barang milik daerah didukung dengan 6 (enam) sub kegiatan masing-masing alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terealisasi sebagaimana ditampilkan pada lampiran 2. Kelima sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 774.206.000,00 realisasi Rp 392.615.100,00 (50,71%), sedangkan target output adalah 1 (satu) standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah terealisasi 1 (satu) dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah (100%)

- **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 277.347.000,00 realisasi Rp 274.733.000,00 (99,05%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan penatausahaan barang milik daerah, terealisasi 1 (satu) laporan penatausahaan barang milik daerah (100%)

- **Pengamanan Barang Milik Daerah**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 898.665.000,00 realisasi Rp 874.691.533,00 (97,33%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil pengamanan barang milik daerah, terealisasi 1 (satu) laporan hasil pengamanan barang milik daerah (100%).

- **Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.664.957.930,00 realisasi Rp 3.464.176.992,77 (94,52%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil pengamanan barang milik daerah, terealisasi 1 (satu) laporan hasil pengamanan barang milik daerah (100%)



Gambar 3.8 Penyimpanan Barang Milik Daerah Rusak Berat

- **Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 802.354.500,00 realisasi Rp 614.826.007,00 (76,62%), sedangkan target output adalah 1 (satu) Dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, terealisasi 1 (satu) dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah (100%)

- **Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 255.411.000,00 realisasi Rp 238.816.400,00 (93,50%), sedangkan target output adalah 48 (empat puluh delapan) orang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota, terealisasi 48 (empat puluh delapan) orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten (100%).

Tabel 3.17 Realisasi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A	88	88	100
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A	88	88	

Pelaksanaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memengaruhi capaian kinerja tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja tujuan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar 97,28%, dan capaian target kinerja sasaran “Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar 97,28%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 1 (satu) target kinerja indikator program yakni persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A dengan target 88% terealisasi 88% sehingga capaian 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk mengelola barang milik daerah dengan baik
- b. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah
- c. Teknologi informasi serta sosial media yang memudahkan akses informasi
- d. Adanya supervisi dari pemerintah pusat yaitu kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pengelolaan asset daerah lebih baik.

Meskipun demikian, terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan program kegiatan dimaksud, yakni:

- a. Peraturan pengelolaan barang milik daerah sangat dinamis
- b. Kemampuan SDM pengelola keuangan daerah belum merata

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait sistem informasi keuangan.
- b. Meningkatkan kapasitas kemampuan SDM pengelola keuangan daerah.

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Alokasi anggaran program sebesar Rp 19.307.657.525,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.914.875.975,99 sehingga capaian sebesar 97,67%. Program ini mendapat dukungan dari 2 (dua) indikator Program yaitu:

1. Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target 22,50 terealisasi sebesar 25,58 sehingga capaian 113,68%.
2. Indeks Kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah dengan target 84,54 terealisasi 85 sehingga capaian 100,54

Program ini mendapat dukungan dari 1 (satu) kegiatan dengan nama yang sama yaitu Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kegiatan ini didukung 10 (sepuluh) sub kegiatan yakni:

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 152.774.900,00 realisasi Rp 150.845.327,00 (98,73%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah, terealisasi 2 (dua) dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah (100%)



Gambar 3.9 Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Evaluasi Capaian dan Konfirmasi Target Retribusi 2025

- **Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 168.199.400,00 realisasi Rp 166.028.072,00 (98,70%), sedangkan target output adalah 8 (delapan) laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, terealisasi 2 (dua) dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah (100%).



Gambar 3.10 Sosialisasi Penyelenggaraan Reklame

- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 589.098.500,00 realisasi Rp 535.385.308,00 (90,88%), sedangkan target output adalah 86 (delapan puluh enam) laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, terealisasi 86 (delapan puluh enam) laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah (100%)
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 354.700.000,00 realisasi Rp 315.609.175,00 (88,97%), sedangkan target output adalah 20.000 obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya, terealisasi 20.000 obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya (100%).
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 457.155.000,00 realisasi Rp 447.173.883,00 (97,81%), sedangkan target output adalah 1 dokumen ketetapan wajib pajak daerah, terealisasi 1 dokumen ketetapan wajib pajak daerah (100%).
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 886.396.650,00 realisasi Rp 840.346.302,00 (94,80%), sedangkan target output adalah 10.000 jenis/layanan dan terealisasi sebanyak 14.669 (147%).

- **Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 476.965.000,00 realisasi Rp 336.506.916,00 (70,55%), sedangkan target output adalah 3800 penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, terealisasi 4200 penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah (110,53%).
- **Penagihan Pajak Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.439.146.000,00 realisasi n target output adalah 1 (satu) dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah terealisasi 1 (satu) dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (100%).



Gambar 3.11 Intensifikasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

- **Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 60.719.800,00 realisasi Rp 60.473.556,00 (99,59%), sedangkan target output adalah 500 (lima ratus) dokumen hasil penyelesaian keberatam pajak daerah, terealisasi 510 (lima ratus sepuluh) dokumen hasil penyelesaian keberatam pajak daerah (102%).
- **Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.596.603.375,00 realisasi Rp 2.511.188.274,00 (96,71%), sedangkan target output adalah 500 (lima ratus) dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah terealisasi 516 (lima ratus enam belas)

dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah (103,2%)

- **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 125.898.900,00 realisasi Rp 125.765.933,00 (99,89%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi Daerah, terealisasi 12 (dua belas) laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah (100%)



Gambar 3.12 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Jurusita Pajak Kabupaten Sleman

Tabel 3.18 Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Perubahan Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	8,85	22,5	25,58	113,68
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap layanan pajak	80,02	84,54	85	100,54

Pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memengaruhi capaian kinerja tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja tujuan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar 97,28%, dan capaian target kinerja sasaran “Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar 97,28%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 1 (satu) target kinerja indikator program yakni persentase peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target 22,25% terealisasi 25,58% sehingga capaian 113,68%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak
- Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah
- c. Teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas data dan memudahkan pelayanan.
- d. Sosial media yang memudahkan akses informasi dan memperluas penyebaran informasi terkait pajak daerah.
- e. Supervisi dari pemerintah pusat yaitu kolaborasi Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan KPK mendorong optimalisasi penerimaan PAD.

Meskipun demikian, terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan program kegiatan dimaksud, yakni:

- a) Respon negatif calon wajib pajak maupun wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya tempat-tempat usaha yang belum membayar pajak dan/atau laporan nihil dari wajib pajak yang sudah terdaftar walaupun secara operasional berdasarkan pemantauan petugas wajib pajak masih beroperasi dan memungut pajak dari pembelinya.
- b) Kemampuan SDM pengelola pendapatan belum merata.
- c) Data base pajak daerah masih belum stabil.

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi dengan maksimal baik melalui pemanggilan maupun pendampingan kepada calon wajib pajak dan/atau wajib pajak
- b) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah.
- c) melakukan pemutakhiran data base untuk meningkatkan pelayanan dan kestabilan data.

3.5. Capaian Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan”

BKAD tidak memiliki indikator kinerja yang mendukung. Dukungan BKAD terhadap Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan” adalah penyaluran dana penguatan modal yang dikelola UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Target penyaluran dana dana penguatan modal untuk tahun 2024 sebesar Rp26.091.000.000, terealisasi sebesar 30.923.700.000,00 atau 118,52% dari target yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran untuk operasional melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp624.000,00 terealisasi sebesar Rp623.847.150,00 atau sebesar 99,97%%.

Adapun rincian realisasi penyaluran dana penguatan modal untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Penyaluran Dana Penguatan Modal Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan			
1.	Tanaman Pangan	1.800.000.000,00	2.809.000.000,00	156,06
2.	Peternakan	4.500.000.000,00	5.689.000.000,00	426,62
3.	Perikanan	2.200.000.000,00	2.9373.000.000,00	133,50
4.	Hortikultura dan Perkebunan	1.800.000.000,00	2.432.000.000,00	135,11
5.	Ketahanan Pangan	1.000.000.000,00	2.240.000.000,00	224,00
II.	Dinas Perindag			
1.	Perindustrian	870.000.000,00	1.590.000.000,00	182,76
2.	Perdagangan Tradisional	300.000.000,00	834.500.000,00	278,17
III.	Dinas Koperasi dan UKM			
1.	Koperasi	5.000.000.000,00	4.650.000.000,00	93,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
2.	UKM	2.500.000.000,00	2.574.200.000,00	102,97
IV.	Dinas Tenaga Kerja			
1.	Tenaga Kerja (CTKI)	120.000.000,00	20.000.000,00	16,67
2.	Tenaga Kerja (Ter-PHK)	10.000.000,00	0	0
3.	Tenaga Kerja (Lulusan Pelatihan)	50.000.000,00	40.000.000,00	80,00
V.	Dinas Sosial			
1.	Kes. Sosial (PMKS/USEP)	1.356.000.000,00	1.356.000.000,00	100,00
VI.	Badan KB, PM & PP			
1.	Kel. UPPKS	2.500.000.000,00	2.963.000.000,00	118,52
VII.	Dinas Pemberdayaan Desa			
1.	Kel. UP2K, PKK & KPA	85.000.000,00	30.000.000,00	35,29
2.	BUMDes	200.000.000,00	0	0
3.	UPK	100.000.000,00	0	0
VIII.	Dinas Kebudayaan & Pariwisata			
1.	Pariwisata	300.000.000,00	0	0
IX.	Bagian Perekonomian			
1.	BUKP	1.400.000.000,00	750.000.000,00	53,57
	Jumlah	26.091.000.000,00	30.923.700.000,00	8,52

Pengelolaan dana penguatan modal selama ini telah berjalan dengan lancar, namun demikian tunggakan dana penguatan modal masih relatife tinggi. Hal ini disebabkan antara lain:

- Kegiatan usaha yang dilaksanakan para peminjam dana penguatan modal mengalami kegagalan.
- Dana pinjaman penguatan modal dipergunakan untuk keperluan lain di luar kegiatan usaha.

Untuk mengatasi tunggakan dana penguatan modal, maka dilakukan beberapa upaya, yaitu:

- Mengintensifkan kegiatan penagihan, baik yang dilakukan oleh UPT PDPM maupun bersama-sama dengan Dinas teknis terkait.
- Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Kejaksaan Negeri Sleman untuk melakukan penagihan.

Selama tiga tahun berturut-turut jumlah dana penguatan modal dan jumlah penerima dana penguatan modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Pengelolaan Dana Penguatan Modal

No	Keterangan	2021	2022	2023	2024
1	Dana Tersalur	29,15 M	27,93 M	28,45 M	30,92 M
2	Jumlah kelompok Penerima	317	328	326	348

BAB IV

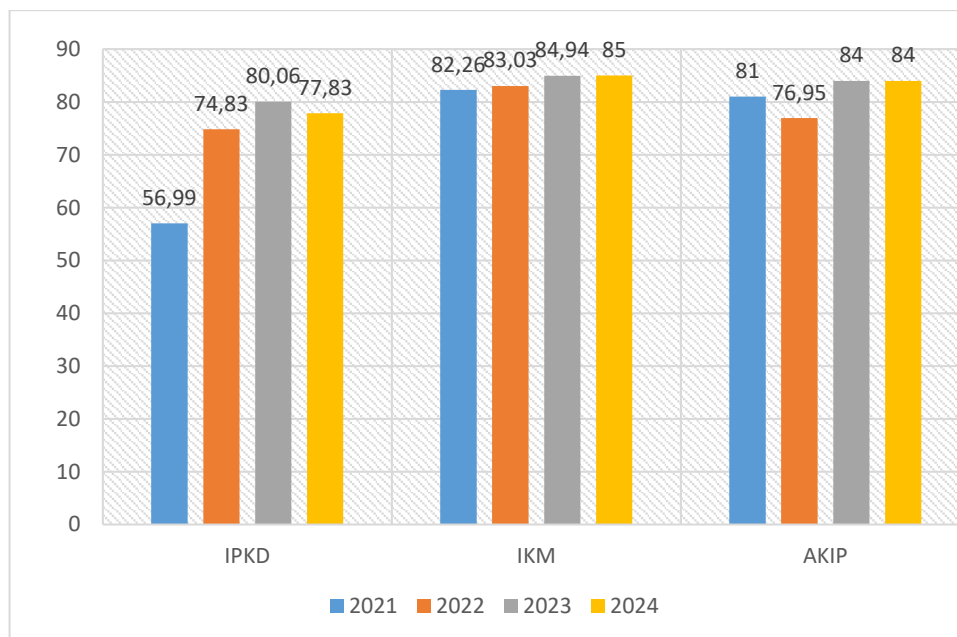
PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta rekomendasi untuk acuan bagi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya, termasuk informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi kinerja tahun 2024 dari KemenpanRB dan Inspektorat Kabupaten.

4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan uraian dalam Bab I hingga Bab III, capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.1 Capaian Kinerja BKAD Tahun 2021 s.d 2024



Atas capaian kinerja tersebut upaya untuk menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib terus dilakukan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan yang terus berubah dari tahun ke tahun serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah semakin baik.

4.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

A. Tindak Lanjut LHE KemenpanRB:

Tabel 4.1 Tindak Lanjut LHE KemenpanRB

No	Catatan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Progres
A	Perencanaan Kinerja				
1.	Rekomendasi tahun sebelumnya terkait dengan pohon kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.	Menyempurnakan pohon kinerja sesuai dengan ; prinsip-prinsip Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan <i>Critical Success Factor</i> yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>) dapat terbangun secara cukup.	Menyempurnakan pohon kinerja sesuai dengan ; prinsip-prinsip Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah pada <i>renstra</i> 2026-2030 yang dituangkan pada dokumen perencanaan (<i>renstra</i>)	Januari – Oktober 2025	Proses penyusunan pohon kinerja
2.	Pengidentifikasi <i>cross cutting</i> pada pohon kinerja yang menggambarkan <i>sharing outcome</i> antar lintas tugas dan fungsi lain belum sepenuhnya terkawal	Memastikan kembali pengidentifikasi <i>crosscutting</i> pada pohon kinerja yang menggambarkan <i>sharing outcome</i> antar lintas tugas dan fungsi lain belum sepenuhnya terkawal	Memastikan kembali pengidentifikasi <i>crosscutting</i> pada pohon kinerja yang menggambarkan <i>sharing outcome</i> antar lintas tugas dan fungsi lain belum sepenuhnya terkawal	Maret – April 2025	
B.	Pengukuran Kinerja				
1.	Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum digunakan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> sehingga belum sepenuhnya budaya kinerja terbentuk dengan baik	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> agar budaya kerja dapat ditingkatkan	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> agar budaya kerja dapat ditingkatkan	Juli - Desember	

No	Catatan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Progres
C.	Pelaporan Kinerja				
1.	Kualitas laporan belum sepenuhnya menyajikan informasi Analisa yang memadai, penyajian informasi pada laporan kinerja masih terbatas pada penyajian data target, realisasi dan capaian kinerja, namun belum sepenuhnya disertai dengan Analisa memadai atas faktor keberhasilan/kegagalan serta strategi yang diperlukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan	Memperbaiki kualitas dokumen kinerja dengan tidak hanya menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja tetapi laporan tersebut juga menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun berikutnya	menyempurnakan Laporan Kerjanya dengan menyajikan analisis mengenai faktor penghambat dan pendukung, analisis detail terkait keberhasilan program/kegiatan, analisis terkait upaya refocusing program-kegiatan sehingga menghasilkan efisiensi, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	Februari 2025	Ditindaklanjuti pada penyusunan LKJIP 2024
2.	Pemanfaatan laporan kinerja belum dimanfaatkan secara efektif untuk perbaikan kinerja, terutama pada proses penentuan target, strategi dan aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja ke depan	Memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi kinerja pada tahun berikutnya	Memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi kinerja pada tahun berikutnya	April – Desember 2025	

B. Tindak Lanjut LHE Inspektorat Kabupaten

Tabel 4.2 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Mempertahankan kinerja yang telah dicapai	Meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan dan Daerah	A	April s.d Desember 2025	Sekretaris	Laporan keuangan dalam proses pemeriksaan. Setelah pemeriksaan LKPD pada

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
						website pemda dan LRA
		Meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	Januari s.d Desember	Sekretaris	Perbaikan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan diantaranya adalah perbaikan kamar mandi dan penataan lay out bidang dafda, pengadaan kendaraan keliling untuk pelayan penerimaan opsen PKB dan BBNKB
		Meningkatkan nilai AKIP	A	Januari-Februari	Sekretaris	pengiriman laporan keuangan, pelaksanaan tugas dan LKjIP tepat waktu dan pengiriman laporan budaya satriya dan profil RB

4.3. Langkah BKAD dalam Meningkatkan Kinerja Pada Masa Mendatang

Dalam hal mewujudkan pelaksanaan kinerja tahun 2025 dengan lebih baik, BKAD telah mengoordinasikan untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan menjaga stabilitas keuangan daerah.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, meningkatkan kualitas data wajib pajak.
- Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas BKAD.
- Meningkatkan kualitas data PBB dengan melakukan inovasi pembuatan "*smart map*".

Catatan penting/strategi tersebut sebagaimana tertuang pada dokumen Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja Kepala BKAD dan SKP Kepala BKAD Tahun 2025 pada tautan:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lcSFTwKyZ4BUI9vjBKfZ3fjoMVZQTKcH>

Lampiran:

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- 2. Dokumen Perencanaan Level Perangkat Daerah**
- 3. RKPD 2024 (batang tubuh dan uraian target perangkat daerah)**

Lampiran 1:

**Perjanjian Kinerja Tahun
2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kustini Sri Purnomo
Jabatan : Bupati Sleman

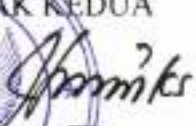
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA

KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK PERTAMA

HARIS SUTARTA SE, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
2		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	81,75	81,75	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah.
4		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP.	-	-	A	A	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 84.100.841.810,00	
2	Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 482.419.147.684,00	
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 6.216.941.430,00	
4	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 17.768.024.675,00	
5	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	Rp. 78.540.000,00	

Sleman, 2 Januari 2024





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elli Widiastuti SE,Ak.

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Elli Widiastuti, SE.Ak

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19710203 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Sekretaris BKAD

no	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100
		PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Prosenase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran. Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kerja.	25%	50%	75%	100%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100.

2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100.
---	--------------------------------------	--	---	-----	-----	-----	------	--

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota		Rp. 83.140.841.810,00
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 66.573.995.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 37.517.179.351,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.141.785.400,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 37.920.666.164,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.377.741.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.296.895.900,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rp. 478.392.858.910,00


 Kepala BKAD Kab Sleman
 Hani Sutarta, SE, MT.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2024.
 Sekretaris BKAD Kab.Sleman

 Elli Widastuti SE,Ak
 Pembina Tingkat I, IVb
 NIP.197102031997032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hāris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



PIHAK KEDUA

Hāris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Eko Yulianti, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP.19740709 199903 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggung Jawaban APBD	-	-	100%	-	Raperda Pertanggung Jawaban APBD yang disusun tepat waktu dibagi dengan Raperda Pertanggung Jawaban APBD dikalikan 100 persen

	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.768.582.250,00	



Kepala BKAD Kab. Sleman

Haris Sutarta, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2024

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Eko Yuliati, SE, M.SE, M.Sc

Pembina, IV/a

NIP 19740709 199903 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19680301 199203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Anggaran

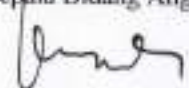
No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu	7	21	40	100	Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu dibagi seluruh Dokumen Anggaran yang disusun dikalikan 100 persen
		Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Ketepatan waktu penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah)	7	30	58	100	Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu dibagi seluruh Dokumen Anggaran yang disusun dikalikan 100 persen

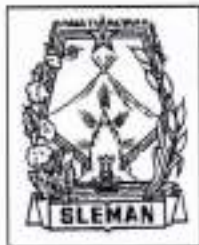
no	Program	Kegiatan	Anggaran
I	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 2.497.760.800,00
		Analisis Inventarisasi Pemerintah Daerah	Rp. 67.540.000,00

Kepala BKAD Kab Sleman

 Harts Sutarta, SE.MT
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2024
 Kepala Bidang Anggaran


 Drs. Ibnu Pujarta, M.Si
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP.19680301 199203 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP.19690327 199803 1 002



PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan Pajak Daerah.	-	75	-	75	Indeks kepuasan layanan Pajak yang diperoleh dari hasil survei terhadap Wajib Pajak Daerah;

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.909.966.675,00	



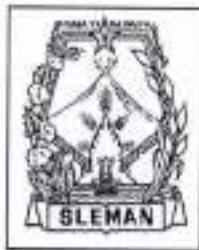
Kepala BKAD Kab. Sleman

Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2024

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Rodentus Condrosulistyo, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19690327 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nisa Fidyati SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Nisa Fidyati SE, M.Si
Pembina, IV/a
NIP.19781010 200604 2 018

PIHAK KEDUA



Haris Sutarta, SE, MT,
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640631 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Perbendaharaan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam Penata Usahaan Keuangan Daerah	25 %	50 %	75 %	100 %	Jumlah Dokumen SP2D yang ditertibkan dari Laporan Pengelolaan Kas Daerah yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah SP2D yang seharusnya ditertibkan dan Laporan Pengelolaan Kas Daerah yang tepat waktu dikalikan 100 %
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	25 %	50 %	70 %	90 %	Jumlah Laporan hasil monitorin dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se DIY dibagi jumlah laopan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan keistimewaan se DIY dikalikan 100%.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.759.945.724,00	
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Keistimewaan	Rp. 78.540.000,00	


 Kepala BKAD Kab. Sleman
 Haris Sutarta, SE, MT.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP 196408311993031006

Sleman, 2 Januari 2024
 Kepala Bidang Perbendaharaan


 Nisa Fidyati SE., M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP 197810102006042018



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 22 Mei 2024

PIHAK PERTAMA


Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev
Pembina , IV/a
NIP.19720423 199503 2 002



PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Perbendaharaan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam Penata Usahaan Keuangan Daerah	25 %	50 %	75 %	100 %	Jumlah Dokumen SP2D yang ditertibkan dari Laporan Pengelolaan Kas Daerah yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah SP2D yang seharusnya ditertibkan dan Laporan Pengelolaan Kas Daerah yang tepat waktu dikalikan 100 %
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	25 %	50 %	70 %	90 %	Jumlah Laporan hasil monitorin dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se DIY dibagi jumlah laopan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan keistimewaan se DIY dikalikan 100%.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.759.945.724,00	
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Keistimewaan	Rp. 78.540.000,00	



Kepala BKAD Kab. Sleman

Hans Sutarta, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19640831 199303 1 006

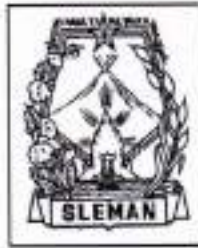
Sleman, 22 Mei 2024

Kepala Bidang Perbendaharaan

Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev

Pembina, IV/a

NIP.19720423 199503 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Widodo, AP, MT
Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Widodo, AP, MT
Pembina, IV/a
NIP 19770821 199511 1 001

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640831 199303 1 006



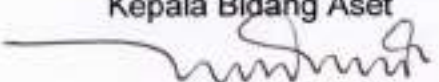
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

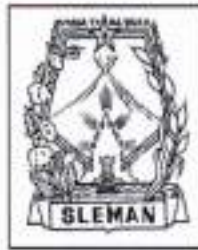
Kepala Bidang Aset

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah .	Prosentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana Kerja.	-	-	-	90%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi Jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100.
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) level A	-	-	-	86 %	Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah.	Rp.2.820.000.000,00	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.551.983,500,00	


 Kepala BKAD Kab. Sleman
 Hars Sutarta, SE, MT
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19640831 199303 1 006

Sleman, 2 Januari 2024
 Kepala Bidang Aset

 Widodo, AP, MT
 Pembina, IV/a
 NIP.19770821 199511 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 22 Mei 2024

PIHAK PERTAMA

Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
NIP.19720615 199203.2 004

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640831 199303 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Aset

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah .	Prosentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana Kerja.	-	-	-	90%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi Jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100.
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) level A	-	-	-	86 %	Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah.	Rp.2.820.000.000,00	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.551.983,500,00	



Kepala BKAD Kab. Sleman

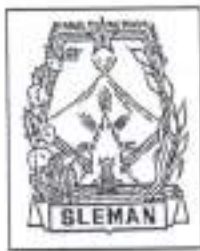
[Signature]
 Haris Sutarta, SE, MT
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.19640831 199303 1 006

Sleman, 22 Mei 2024

Kepala Bidang Aset

[Signature]

Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP.19720615 199203 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sumali, SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE.MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

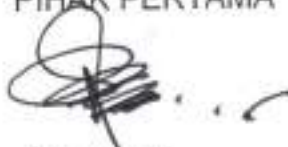
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA


Sumali, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19690210 199003 1 007

PIHAK KEDUA




Haris Sutarta, SE.MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640831 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) level A	25%	25 %	25%	100%	Jumlah OPD yang memiliki kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100%

NO	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Prpgram Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.664.957.930,00	

Sleman, 2 Januari 2024



Kepala BKAD Kab. Sleman

Haris Butarta, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

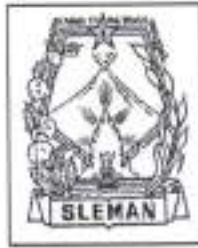
NIP.19640831 199303 1 006

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

Sumali, SE

Penata Tingkat I,III/d

NIP.19690210 199003 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sumali, SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE.MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA


Sumali, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19690210 199003 1 007

PIHAK KEDUA

Haris Sutarta, SE.MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640831 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) level A	25%	25 %	25%	100%	Jumlah OPD yang memiliki kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100%

NO	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Prpgram Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.664.957.930,00	

Sleman, 2 Januari 2024



Kepala BKAD Kab. Sleman

Haris Sutarta, SE, MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

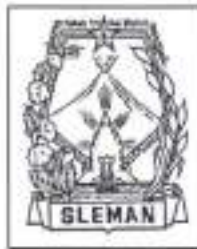
NIP.19640831 199303 1 006

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

Sumali, SE

Penata Tingkat I, III/d

NIP.19690210 199003 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Haris Sutarta, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19700607 199703 1 006



Haris Sutarta SE, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan Administrasi perkantoran yang terpenuhi di bagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 960.000.000,00	



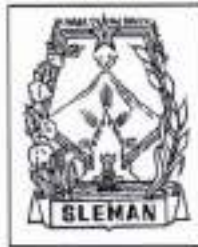
Kepala BKAD Kab. Sleman

Hans Sutarta, SE, MT,
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196408311993031006

Sleman, 2 Januari 2024

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat I, /III d
NIP.19700607 199703 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Elli Widiastuti, SE, Ak
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM
Pembina IV/a
NIP 197205291998032007

PIHAK KEDUA

Elli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19710203 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian

N o	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Informasi Birokrasi	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2. Laporan Administrasi Kepegawaian	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3. Pembayaran Tenaga non PNS/PHL	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Layanan Keamanan Kantor	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

		2.Layanan kebersihan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. ATK 2. Layanan Makanan dan Minuman Rapat	100 100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100 25 50 75 100	25 50 75 100 25 50 75 100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Makanan dan Minuman Tamu	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
7	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Layanan Makanan dan Minuman Tamu	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan Surat Menyurat	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa langganan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
10	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	1.Layanan Keamanan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
		2.Layanan Kebersihan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
		2.Layanan penyediaan BBM Kendaraan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
13	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 1.377.741.000,00	
2.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 122.789.000,00	
3.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 200.000.000,00	
4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 780.438.400,00	
5.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 350.000.000,00	
6.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 155.400.000,00	
7.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 532.379.720,00	
8.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 126.000.000,00	
9.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.37.290.516.664,00	
10.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 504.149.500,00	
11.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 640.250.000,00	
12.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 191.050.000,00	
13.Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 465.595.900,00	

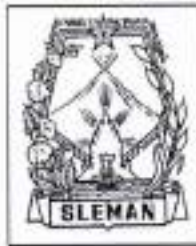


Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Eli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian

Raden Rara Yun Wahyuni, SE, MM
Pembina IV/a
NIP. 19720529 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Misri Rusmiyati, SE, M.M
Jabatan : Kepala Subbidang Keuangan Sekretariat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Elli Widiastuti, SE, Ak
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Misri Rusmiyati, SE, M.M
Penata Tingkat I. III/d
NIP. 197201131992082001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Keuangan Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Gaji dan Tunjangan Pegawai	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		4. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		5. Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
		2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
		3. Tunjangan Pengelola BMD	33	Triwulan I	8	8
				Triwulan II	16	16
				Triwulan III	24	24
				Triwulan IV	33	33
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1. Dokumen Laporan Aset/BMD	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		2. Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	20	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	-	-
				Triwulan IV	20	20
		3. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

		4. Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20
		5. Koordinasi Pengelola Keuangan BKAD	20	Triwulan I	5	5
				Triwulan II	10	10
				Triwulan III	15	15
				Triwulan IV	20	20

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 36.788.816.151,00	
2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 641.900.000,00	
3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 86.463.200,00	



Sekretaris BKAD

Eli Widiastuti, SE, Ak

Pembina Tingkat I, IV/b

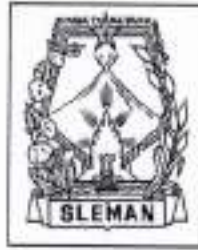
NIP. 19710203 199703 2 002

Kasubbagian Keuangan Sekretariat

Misri Rusmiyati, SE, M.M

Penata Tingkat I, III/d

NIP. 19720113 199208 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Triningsih, SE, Ak

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Elli Widiastuti, SE, Ak

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



PIHAK KEDUA

Elli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP. 19710203 1997032 002

Sleman, 22 Mei 2024

PIHAK PERTAMA

Triningsih, SE, Ak
Penata Tingkat I. III/d
NIP. 197908072005012014

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Keuangan Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 25 25 25
2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 25 25 25
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD.	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 25 25 25

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 36.788.816.151,00	
2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 641.900.000,00	
3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 86.463.200,00	



Sekretaris BKAD

Eli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

Kasubbagian Keuangan

Triningsih, SE, Ak
Penata Tingkat I, III/d
NIP.197908072005012014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rumiwati, S.IP

Jabatan : Kepala Subbag TU UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ahmad Sudarsana, SE, Ak

Jabatan : Kepala TU UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Ahmad Sudarsana, SE, Ak

Penata Tingkat, I/IIId

NIP. 19700607 19970 3 1006

Sleman, 2 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Rumiwati, S.IP

Penata Tingkat, I/IIId

NIP. 19701022 19920 3 2001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BKAD
 UPTD : Pengelolaan Dana Penguatan Modal
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per triwulan	Target PK (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Berita Acara Verifikasi Dana Penguatan Modal	1,60	Triwulan I	0,25%	25%	
				Triwulan II	0,50%	50%	
				Triwulan III	1,20%	75%	
				Triwulan IV	1,60%	100%	
		2 Data Piutang Dana Penguatan Modal	16,30	Triwulan I	4,07%	20%	
				Triwulan II	8,14%	40%	
				Triwulan III	12,21%	90%	
				Triwulan IV	16,30%	100%	
		3. Laporan Keuangan Dana Penguatan Modal	1,7	Triwulan I	0,25%	25%	
				Triwulan II	0,50%	50%	
				Triwulan III	1,29%	75%	
				Triwulan IV	1,70%	100%	
		4. Laporan Monitoring DPM	2	Triwulan I	1,00%	25%	
				Triwulan II	1,50%	50%	
				Triwulan III	2,00%	75%	
				Triwulan IV	3,00%	100%	

		5. Laporan Penyelesaian Tunggakan Dana Penguatan Modal	4	Triwulan I	0%	0%	
				Triwulan II	0%	0%	
				Triwulan III	0%	0%	
				Triwulan IV	4%	100%	
		6. Pelayanan Agunan dan Sewa Deposit (SDB)	3,30	Triwulan I	2,72%	25%	
				Triwulan II	1,64%	50%	
				Triwulan III	2,46%	75%	
				Triwulan IV	3,30%	100%	
		7. RBA UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal	10,90	Triwulan I	0%	0%	
				Triwulan II	0%	0%	
				Triwulan III	2,19%	50%	
				Triwulan IV	10,90%	100%	
		8. Sistem Informasi Dana Penguatan Modal	0,30	Triwulan I	0%	0%	
				Triwulan II	0%	0%	
				Triwulan III	2,19%	50%	
				Triwulan IV	10,90%	100%	
		9. SK Penetapan Penerima dan Besaran Dana	10,40	Triwulan I	0%	20%	
				Triwulan II	0%	40%	
				Triwulan III	2,19%	60%	
				Triwulan IV	10,90%	100%	
		10 Surat Perjanjian Pinjaman DPM	21,30	Triwulan I	4,75%	20%	

				Triwulan II	9,50%	40%	
				Triwulan III	15,99%	60%	
				Triwulan IV	21,80%	100%	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 960.000,000,00	



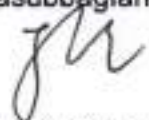
Kepala UPTD PDPM

 Ahmad Sudarsana, SE, Ak

 NIP. 19700607 19970 3 1006

Sleman, 2 Januari 2024

 Kasubbagian TU UPTD PDPM



 Rumiati, S.IP

 NIP. 19701022 19920 3 2001



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra.TINA HASTANI,MM

Jabatan : Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : KUSNO WIBOWO

Jabatan : Pjs. Bupati Sleman

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK KESATU,

Dra.TINA HASTANI,MM,
Pembina Utama Muda ,IV/c
NIP 19700429 199603 2 006



PIHAK KEDUA,

KUSNO WIBOWO

**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

1. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA *)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan (per Triwulan)				Target Perubahan **)	Rumus Penghitungan
					I	II	III	IV		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	-	-	-	B	A	Nilai Indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah Propinsi untuk Pemerintah Kabupaten
2		Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	-	-	-	B	A	Nilai Indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah Propinsi untuk Pemerintah Kabupaten
3	Meningkatkan kualitas pelayanan public perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	-	-	81,75	81,75	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat	-	-	-	A	A	Hasil penilaian Kementrian PAN dan RB

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program*)	Anggaran sebelum Perubahan (Rp)**)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)**)	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan .	78.540.000,00	78.540.000,00	Dana Keistimewaan
2.	Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	83.140.841.810,00	94.645.807.650,00	Perubahan- APBD 2024
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah	482.419.147.684,00	516.715.147.337,00	Perubahan- APBD 2024
4.	Pengelolaan Barang Daerah	2.551.983.500,00	3.007.983.500,00	Perubahan- APBD 2024
5.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.768.024.675,00	19.307.657.525,00	Perubahan-APBD 2024
Jumlah (Rp)		585.958.537.684,00	633.755.136.012,00	



Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK KESATU,



Dra.TINA HASTANI,MM
Pembina Utama Muda ,IV/c
NIP 19700429 199603 2 006



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra.TINA HASTANI,MM

Jabatan : Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : KUSTINI SRI PURNOMO

Jabatan : Bupati Sleman

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 25 November 2024

PIHAK KEDUA,



KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,



Dra.TINA HASTANI,MM
Pembina Utama Muda,IV/c.
NIP197004291996032006

**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

1. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA *)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan (per Triwulan)				Target Perubahan	Rumus Penghitungan
					I	II	III	IV		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	-	-	B	A	Nilai Indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi untuk Pemerintah Kabupaten
2		Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	-	-	B	A	Nilai Indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi untuk Pemerintah Kabupaten
3	Meningkatkan Kualitas pelayanan Public Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	-	-	81,75	81,75	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	Predikat	-	-	-	A	A	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program*)	Anggaran sebelum Perubahan (Rp)**)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)**)	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	78.540.000,00	78.540.000,00	Dana Keistimewaan
2.	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83.140.841.810,00	94.645.807.650,00	Perubahan-APBD 2024
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah	482.419.147.684,00	516.715.147.337,00	Perubahan-APBD 2024
4.	Pengelolaan Barang Daerah	2.551.983.500,00	3.007.983.500,00	Perubahan-APBD 2024
5.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.768.024.675,00	19.307.657.525,00	Perubahan-APBD 2024
Jumlah (Rp)		585.958.537.684,00	633.755.136.012,00	

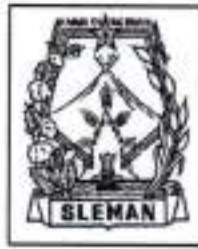
Sleman, 25 November 2024

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

 KUSTINI SRI PURNOMO


 Dra. TINA HASTANI, MM
 Pembina Utama Muda, IV/c.
 NIP. 197004291996032006



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ELLI WIDIASTUTI, SE, Ak.

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra.TINA HASTANI, MM

Jabatan : Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

ELLI WIDIASTUTI, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

PIHAK KEDUA

Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Sekretaris BKAD

no	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	25%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100
		PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Prosenase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran. Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kerja.	25%	50%	75%	100%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100.

2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100.
---	--------------------------------------	--	---	-----	-----	-----	------	--

No	Program	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota		Rp. 83.140.841.810,00	Rp. 94.645.807.650,00	
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 66.573.995.000,00	Rp. 60.273.935,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 37.517.179.351,00	Rp. 35.556.557.201,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .	Rp. 1.377.741.000,00	Rp. 1.169.573.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 37.920.666.164,00	Rp. 45.636.337.064,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.141.785.400,00	Rp. 2.512.972.100,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.296.895.900,00	Rp. 1.580.457.900,00	
2	Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rp. 478.325.318.910,00	Rp.512.772.111.863,00	



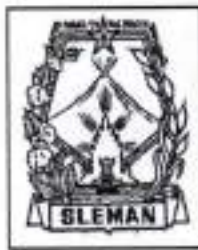
Plt.Kepala BKAD Kab Sleman

Dra.TINA HASTANI, MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19700429 199603 2 006

Sleman, 22 Oktober 2024.

Sekretaris BKAD Kab.Sleman

ELLWIDIASTUTI, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IVb
NIP.197102031997032002



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : EKO YULIATI, SE, M.SE, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra.TINA HASTANI,MM
Jabatan : Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman,22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA


EKO YULIATI, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP19740709 199903 2 007

PIHAK KEDUA


Dra.TINA HASTANI, MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP19700429 199603 2 006



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggung Jawaban APBD	-	-	100%	-	Raperda Pertanggung Jawaban APBD yang disusun tepat waktu dibagi dengan Raperda Pertanggung Jawaban APBD dikalikan 100 persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.768.582.250,00	Rp.768.763.950,00	



Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dra.TINA HASTANI,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19700429 199603 2 006

Sleman, 22 Oktober 2024

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

EKO YULIATI, SE, M.SE, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP 19740709 199903 2 007



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. IBNU PUJARTA, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra.TINA HASTANI, MM
Jabatan : Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Dra.TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19700429 199603 2 006

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

Drs. IBNU PUJARTA, M.Si
Pembina, IV/a
NIP 19680301 199203 1 005

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

Kepala Bidang Anggaran

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pengelola Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu Prosentase Ketepatan waktu penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah)	7% 7%	21% 30%	40% 58%	100% 100%	Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu dibagi seluruh Dokumen Anggaran yang disusun dikalikan 100 persen. Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu dibagi hasil seluruh Dokumen Anggaran yang disusun dikalikan 100 persen

Program	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 2.497.760.800,00	Rp. 2.324045.800,00	
	Analisis Inventarisasi Pemerintah Daerah	Rp. 67.540.000,00	Rp. 47.540.000,00	

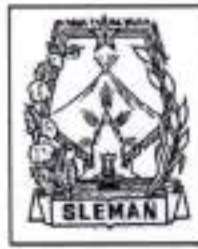


Pt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dra. TINA HASTANI, MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006.

Sleman, 22 Oktober 2024
Kepala Bidang Anggaran

Drs. IBNU PUJARTA, M.Si
Pembina, IV/a
NIP 19680301 199203 1 005



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : R. CONDROSULISTYO, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra.TINA HASTANI, MM

Jabatan : Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



PIHAK KEDUA

Dra.TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197004291996032006

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

R. CONDROSULISTYO, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP 196903271998031002

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target sebelum perubahan				Target setelah Perubahan	Rumus Penghitungan
				I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Program Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan Pajak Daerah.	-	-	-	80,10	84,54	Indeks kepuasan layanan Pajak yang diperoleh dari hasil survey terhadap Wajib Pajak Daerah.

No.	Program	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1.	Program Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.4.909.966.675,00	Rp. 5.360.918.525,00	



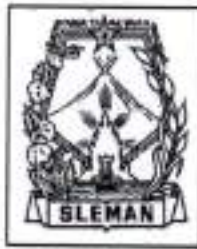
Pit. Kepala BKAD Kab. Sleman

Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197004291996032006

Sleman, 22 Oktober 2024

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

R. CONDROSULISTYO, SE, MM
Pembina, IV/a
NIP. 196903271998031002



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUH.YUNAN NURTRianto, S.STP, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. TINA HASTANI, MM
Jabatan : Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

MUH.YUNAN NURTRianto, S.STP, M.Sc
Pembina, IV/a
NIP 198106251999121001

PIHAK KEDUA

Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197004291996032006

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target sebelum perubahan				Target setelah perubahan	Rumus penghitungan
				I	II	III	IV	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase PAD terhadap total Pendapaan Daerah	33	33	33	33	33	Jumlah realisasi PAD tahun n dibagi jumlah realisasi pendapatan daerah tahun n dikali 100%
			Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah dan retrebusi daerah	8,79	8,79	8,79	8,79	22,50	Jumlah realisasi PAD tahun n dibagi jumlah realisasi pendapatan daerah tahun n dikali 100%

No.	Program	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 12.858.058.000,00	Rp. 13.946.739.000,00	



 Plt. Kepala BKAD Kab. Sleman



 Dra. TINA HASTANI, MM.

 Pembina Utama Muda, IV/c

 NIP. 197004291996032006

Sleman, 22 Oktober 2024

 Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan



 MUH. YUNAN NURTRIANTO, S.STP, M.Sc

 Pembina, IV/a

 NIP. 19660207 199302 2 001



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : TINTIN FATHONAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra.TINA HASTANI, MM
Jabatan : Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

TINTIN FATHONAH, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
NIP 197206151992032004

PIHAK KEDUA

Dra.TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197004291996032006



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

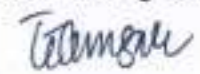
Kepala Bidang Aset

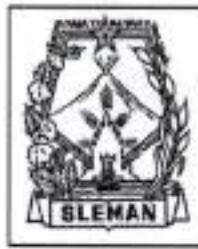
No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja.	-	-	-	90%	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) level A	-	-	-	86 %	Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen

No.	Program	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Rp.2.820.000.000,00	Rp. 3.455.474.950,00	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.2.551.983.500,00	Rp. 3.007.983.500,00	


 Plt.Kepala BKAD Kab. Sleman

Dra. TINA HASTANI, MM
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.197004291996032006

Sleman, 22 Oktober 2024
 Kepala Bidang Aset

TINTIN FATHONAH, S.Sos, M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP.197206151992032004



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AHMAD SUDARSANA, SE, Ak
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra.TINA HASTANI, MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19700429 199603 2 006

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

AHMAD SUDARSANA, SE, Ak
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19700607 199703 1 006

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Prosentase pemenuhan kebutuhan Adminstrasi perkantoran	25%	50%	75%	100%	Jumlah layanan Administrasi perkantoran yang terpenuhi di bagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100.

No	Program	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 960.000.000,00	Rp. 624.000.000,00	



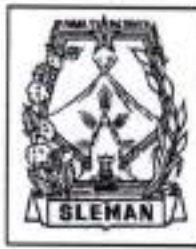
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Ast Daerah

Dra. TINA HASTANI, MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19700429 199603 2 006

Sleman, 22 Oktober 2024

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

AHMAD SUDARSANA, SE, Ak
Penata Tingkat I, /III d
NIP.19700607 199703 1 006



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SUMALI, SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. TINA HASTANI, MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

SUMALI, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP19690210 199003 1 007

PIHAK KEDUA

Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP-19700429 199603 2 006

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) level A	25%	25 %	25%	100%	Jumlah OPD yang memiliki kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100%

No	Program	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.664.957.930,00	Rp. 3.664.957.930,00	

Sleman, 22 Oktober 2024

Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

SUMALI, SE

Penata Tingkat I, III/d

NIP.19690210 199003 2 007

Pt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dra. TINA HASTANI, MM.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19700429 199603 2 006



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rr.YUN WAHYUNI, SE, MM

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ELLI WIDIASTUTI, SE, Ak

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

Rr.YUN WAHYUNI, SE, MM

Pembina, IV/a

NIP. 197205291998032007

PIHAK KEDUA

ELLI WIDIASTUTI, SE, Ak

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19710203 1997032002



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

Subag Umum dan Kepegawaian

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.Dokumen laporan pelaksanaan Road map informasi Birokrasi	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		2.Laporan Administrasi Kepegawaian	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
		3.Pembayaran Tenaga PNS/PHL	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Alat Listrik	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Layanan Keamanan Kantor	100	Triwulan I	25	25
				Triwulan II	50	50
				Triwulan III	75	75
				Triwulan IV	100	100

		2. Layanan Kebersihan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. ATK 2. Layanan makanan dan minuman Kantor	100 100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100 25 50 75 100	25 50 75 100 25 50 75 100
5	Pemeliharaan,Barang Cetakan dan penggandaan	Layanan cetak dan penggandaan dokumen.	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan makanan dan Minuman Tamu	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
7	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan makanan dan Minuman Tamu	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
8	Penyediaan Jasa surat menyurat	Layanan surat menyurat	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

9	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan listrik	Pembayaran Jasa Langganan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1. Layanan Keamanan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
		2.Layanan Kebersihan Kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan ,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	1.Layanan Pemel Kendaraan Dinas		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
		2.Layanan penyediaan BBM Kendaraan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
12	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Layanan Pemeliharaan peralatan kerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Layanan Pemeliharaan peralatan kerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25 50 75 100

Sub Kegiatan	Anggaran sebelum perubahan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 1.377.741.000	Rp. 1.169.573.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 122.789.000.000	Rp. 78.087.600,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 200.000.000,00	Rp. 636.301500,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 780.438.400,00	Rp. 755.627.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 155.400.000	Rp. 91.518.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 533.158.000,00	Rp. 601.438.000,00	
Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp. 126.000.000.00	Rp. 126.000.000,00	
Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp. 37.290.516.664,00	Rp. 45.009.462.064,00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 640.250.000,00	Rp. 609.312.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 191.050.000,00	Rp. 195.550.000,00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 465.595.900,00	Rp. 775.595.900,00	



Sekretaris BKAD
Kabupaten Sleman

ELLI WIDIASTUTI, SE. Ak
Pembina Tingkat I.IV/b
NIP.197102031997032002

Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian.

Rr.YUN WAHYUNI. SE. MM
Pembina, IV/a
NIP.19720529 199803 2 007



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : TRININGSIH, SE, Ak

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ELLI WIDIASTUTI, SE, Ak

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

TRININGSIH, SE, Ak
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197908072005012014



PIHAK KEDUA

ELLI WIDIASTUTI, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
*NIP. 19710203 197032 002

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

Keuangan Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot Per Triwulan	Target PK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 25 25 25
2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 25 25 25
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD.	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 25 25	25 25 25 25

Sub Kegiatan	Anggaran sebelum perubahan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 36.788.816.151,00	Rp. 34.889.834.001,00	
2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 641.900.000,00	Rp. 582.360.000,00	
3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 86.463.200,00	Rp. 84.363.200,00	

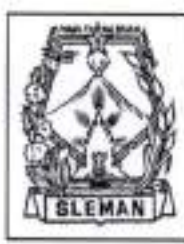


Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

ELLI WIDIASTUT, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710203 199703 2 002

Kasubbagian Keuangan

TRININGSIH, SE, Ak
Penata Tingkat I, III/d
NIP.197908072005012014



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rumiwati, S.IP
Jabatan : Kepala Subbag TU UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Jabatan : Kepala TU UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Ahmad Sudarsana, SE, Ak
Penata Tingkat, I/IIId
NIP. 19700607 19970 3 1006

Sleman, 22 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

Rumiwati, S.IP
Penata Tingkat, I/IIId
NIP. 19701022 19920 3 2001

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

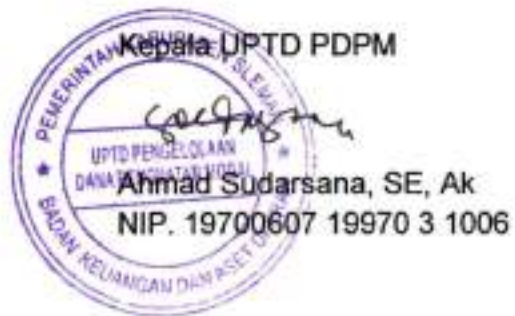
Satuan Kerja Perangkat Daerah : BKAD
 UPTD : Pengelolaan Dana Penguatan Modal
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per triwulan	Target PK (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Berita Acara Verifikasi Dana Penguatan Modal	1,60	Triwulan I	0,25%	25%	
				Triwulan II	0,50%	50%	
				Triwulan III	1,20%	75%	
				Triwulan IV	1,60%	100%	
		2 Data Piutang Dana Penguatan Modal	16,30	Triwulan I	4,07%	20%	
				Triwulan II	8,14%	40%	
				Triwulan III	12,21%	90%	
				Triwulan IV	16,30%	100%	
		3. Laporan Keuangan Dana Penguatan Modal	1,7	Triwulan I	0,25%	25%	
				Triwulan II	0,50%	50%	
				Triwulan III	1,29%	75%	
				Triwulan IV	1,70%	100%	
		4. Laporan Monitoring DPM	2	Triwulan I	1,00%	25%	
				Triwulan II	1,50%	50%	
				Triwulan III	2,00%	75%	
				Triwulan IV	3,00%	100%	

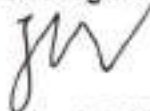
		5. Laporan Penyelesaian Tunggakan Dana Penguatan Modal	4	Triwulan I	0%	0%	
				Triwulan II	0%	0%	
				Triwulan III	0%	0%	
				Triwulan IV	4%	100%	
		6. Pelayanan Agunan dan Sewa Deposit (SDB)	3,30	Triwulan I	2,72%	25%	
				Triwulan II	1,64%	50%	
				Triwulan III	2,46%	75%	
				Triwulan IV	3,30%	100%	
		7. RBA UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal	10,90	Triwulan I	0%	0%	
				Triwulan II	0%	0%	
				Triwulan III	2,19%	50%	
				Triwulan IV	10,90%	100%	
		8. Sistem Informasi Dana Penguatan Modal	0,30	Triwulan I	0%	0%	
				Triwulan II	0%	0%	
				Triwulan III	2,19%	50%	
				Triwulan IV	10,90%	100%	
		9. SK Penetapan Penerima dan Besaran Dana	10,40	Triwulan I	0%	20%	
				Triwulan II	0%	40%	
				Triwulan III	2,19%	60%	
				Triwulan IV	10,90%	100%	
		10. Surat Perjanjian Pinjaman DPM	21,30	Triwulan I	4,75%	20%	

				Triwulan II	9,50%	40%	
				Triwulan III	15,99%	60%	
				Triwulan IV	21,80%	100%	

No	Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 960.000.000,00	Rp. 624.000.000,00	



Sleman, 22 Oktober 2024
Kasubbagian TU UPTD PDPM


Rumiya, S.I.P
NIP. 19701022 19920 3 2001

Lampiran 2:

**Dokumen Perencanaan Level
Perangkat Daerah**

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SLEMAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						592.016.743.067,00							182.826.267.651,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						200.000.000,00							256.027.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						200.000.000,00							256.027.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	200.000.000,00						-	256.027.000,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	256.027.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				4.00 Laporan	200.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		256.027.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						591.816.743.067,00							182.570.240.651,00	
	5.02	KEUANGAN						591.816.743.067,00							182.570.240.651,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	92.860.261.746,00						-	88.026.706.346,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	70.073.995,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	109.968.238,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	53.143.720,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		100.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.762.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		2.953.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.091.600,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		2.196.363,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2.349.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		2.467.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.274.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		2.231.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	8.451.375,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	39.447.505.951,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	39.369.040.693,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90.00 Orang/bulan	38.719.142.751,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		38.382.105.557,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	641.900.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		840.630.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	86.463.200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		146.305.136,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.377.741.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.377.741.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.163.285.400,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	2.757.205.704,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	144.289.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		218.704.158,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		267.211.350,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	780.438.400,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		846.254.346,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	350.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		313.258.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	155.400.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelayanan Publik	-		163.170.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	533.158.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		948.607.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.500.000.000,00			-	-	-	-	2.475.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	4.500.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.475.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	44.214.209.500,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	40.173.456.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	126.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		171.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.584.060.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		39.463.263.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	504.149.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		539.043.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.087.445.900,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	3.141.335.486,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	645.800.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		2.888.469.236,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	231.050.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		242.602.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	210.595.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		10.263.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	482.044.323.146,00						-	75.826.138.132,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	2.384.720.800,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	2.943.441.120,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	210.595.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		371.607.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	146.696.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		220.614.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				75 Dokumen	12.405.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		19.333.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				75 Dokumen	12.405.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		19.333.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				75 Dokumen	43.950.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		66.303.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				75 Dokumen	17.823.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		40.053.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1.315.806.200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.570.120.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	113.689.200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelayanan Publik	-		156.077.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	511.350.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		480.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	778.845.724,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	814.299.275,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	87.291.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		93.356.550,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	167.149.150,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		180.127.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	72.890.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	266.884.674,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		309.759.975,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	46.130.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		55.130.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	138.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		50.925.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	768.582.250,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	1.107.559.959,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	74.733.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		87.919.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	512.229.850,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		629.829.742,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	170.987.400,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		267.581.370,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				182 Orang	10.632.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		122.229.197,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	478.112.174.372,00			-	-	-	-	70.960.837.778,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				3 Laporan	67.540.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.370.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	371.741.835.960,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		773.182.415,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	24.310.973.003,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		898.603.863,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	81.991.825.409,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		69.250.681.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	2.447.263.500,00						-	3.009.651.266,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	2.447.263.500,00			-	-	-	-	3.009.651.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	774.206.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		813.380.599,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	313.970.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		394.251.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	598.665.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelayanan Publik	-		654.475.762,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	496.354.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		530.839.155,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				48 Orang	264.068.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		616.703.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	14.464.894.675,00						-	15.707.744.907,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	14.464.894.675,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	15.707.744.907,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	148.759.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		108.045.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				8 Laporan	175.082.400,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		138.849.375,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				86 Laporan	639.098.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		744.620.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				20000 Obyek Pajak	375.700.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelayanan Publik	-		899.210.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	360.855.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		360.855.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10000 Layanan	794.956.800,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelayanan Publik	-		887.624.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				3800 Dokumen	549.425.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		471.896.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	8.961.781.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelayanan Publik	-		9.414.910.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				500 Dokumen	85.535.800,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelayanan Publik	-		140.267.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				33 Dokumen	2.268.801.375,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		2.429.433.037,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	104.898.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		112.033.845,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	J U M L A H							592.016.743.067,00								182.826.267.651,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SLEMAN TAHUN 2024																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								592.016.743.067,00	585.958.537.669,00	624.475.396.402,00	32.458.653.335,00							182.826.267.651,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							200.000.000,00	78.540.000,00	78.540.000,00	-121.460.000,00							256.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							200.000.000,00	78.540.000,00	78.540.000,00	-121.460.000,00							256.027.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daera				-	100 %	200.000.000,00	78.540.000,00	78.540.000,00	56.027.000,00							256.027.000,00		
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024				-	3 Laporan	200.000.000,00	78.540.000,00	78.540.000,00	-121.460.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat		256.027.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				4.00 Laporan	4.00 Laporan	200.000.000,00	78.540.000,00	78.540.000,00	-121.460.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			256.027.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							591.816.743.067,00	585.879.997.669,00	624.396.856.402,00	32.580.113.335,00							182.570.240.651,00		
	5.02	KEUANGAN							591.816.743.067,00	585.879.997.669,00	624.396.856.402,00	32.580.113.335,00							182.570.240.651,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	92.860.261.746,00	83.140.841.810,00	90.267.246.150,00	-4.833.555.400,00							88.026.706.346,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	70.073.995,00	66.573.995,00	60.273.935,00	-9.800.060,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		109.968.238,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	53.143.720,00	49.643.720,00	43.343.720,00	-9.800.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			100.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.440,00	-60,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.953.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.091.600,00	2.091.600,00	2.091.600,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.196.363,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.349.900,00	2.349.900,00	2.349.900,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.467.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.274.900,00	2.274.900,00	2.274.900,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.231.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	8.451.375,00	8.451.375,00	8.451.375,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu				-	100 %	39.447.505.951,00	37.517.179.351,00	36.206.557.201,00	-3.240.948.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		39.369.040.693,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90.00 Oran g/bulan	90.00 Oran g/bulan	38.719.142.751,00	36.788.816.151,00	35.539.834.001,00	-3.179.308.750,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			38.382.105.557,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	641.900.000,00	641.900.000,00	582.360.000,00	-59.540.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			840.630.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	86.463.200,00	86.463.200,00	84.363.200,00	-2.100.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			146.305.136,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu				-	100 %	1.377.741.000,00	1.377.741.000,00	1.254.157.000,00	-123.584.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.377.741.000,00	1.377.741.000,00	1.254.157.000,00	-123.584.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum				-	90 %	2.163.285.400,00	2.141.785.400,00	2.463.513.500,00	300.228.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		2.757.205.704,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	144.289.000,00	122.789.000,00	78.087.600,00	-66.201.400,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			218.704.158,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	552.406.500,00	352.406.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			267.211.350,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	780.438.400,00	780.438.400,00	762.181.400,00	-18.257.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			846.254.346,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			313.258.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	155.400.000,00	155.400.000,00	119.400.000,00	-36.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			163.170.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	533.158.000,00	533.158.000,00	601.438.000,00	68.280.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			948.607.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja				-	90 %	4.500.000.000,00	2.820.000.000,00	3.455.474.950,00	-1.044.525.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat		2.475.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	10 Unit	4.500.000.000,00	2.820.000.000,00	3.455.474.950,00	-1.044.525.050,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			2.475.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah				-	100 %	44.214.209.500,00	37.920.666.164,00	45.255.811.664,00	1.041.602.164,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		40.173.456.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			171.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.584.060.000,00	37.290.516.664,00	44.640.516.664,00	1.056.456.664,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			39.463.263.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	504.149.500,00	504.149.500,00	489.295.000,00	-14.854.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			539.043.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah terpelihara				-	90 %	1.087.445.900,00	1.296.895.900,00	1.571.457.900,00	484.012.000,00			-	- -	Masyarakat		3.141.335.486,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	645.800.000,00	640.250.000,00	609.312.000,00	-36.488.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			2.888.469.236,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	231.050.000,00	191.050.000,00	186.550.000,00	-44.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			242.602.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	210.595.900,00	465.595.900,00	775.595.900,00	565.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.263.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu				-	100 %	482.044.323.146,00	482.419.147.684,00	512.268.969.227,00	-406.218.185.014,00							75.826.138.132,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu				-	100 %	2.384.720.800,00	2.497.760.800,00	2.461.445.800,00	76.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		2.943.441.120,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	210.595.900,00	210.595.900,00	190.595.900,00	-20.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			371.607.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	146.696.000,00	146.696.000,00	146.696.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			220.614.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				75 Dokumen	75 Dokumen	12.405.000,00	12.405.000,00	12.405.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			19.333.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				75 Dokumen	75 Dokumen	12.405.000,00	12.405.000,00	12.405.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			19.333.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				75 Dokumen	75 Dokumen	43.950.000,00	31.950.000,00	31.950.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			66.303.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				75 Dokumen	75 Dokumen	17.823.000,00	17.823.000,00	17.823.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			40.053.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.315.806.200,00	1.315.806.200,00	1.315.806.200,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			1.570.120.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	113.689.200,00	113.689.200,00	113.689.200,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			156.077.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	511.350.500,00	636.390.500,00	620.075.500,00	108.725.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			480.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah				-	100 %	778.845.724,00	759.945.724,00	802.685.724,00	23.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		814.299.275,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	87.291.000,00	87.291.000,00	87.291.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			93.356.550,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	2 Dokumen	167.149.150,00	157.249.150,00	207.249.150,00	40.100.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			180.127.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	72.890.900,00	72.890.900,00	72.890.900,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	266.884.674,00	266.884.674,00	259.624.674,00	-7.260.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			309.759.975,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				12 Laporan	12 Laporan	46.130.000,00	46.130.000,00	46.130.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			55.130.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	138.500.000,00	129.500.000,00	129.500.000,00	-9.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			50.925.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Presentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD</i>				-	100 %	768.582.250,00	768.582.250,00	768.763.950,00	181.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		1.107.559.959,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	74.733.000,00	74.733.000,00	74.733.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			87.919.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	512.229.850,00	512.229.850,00	512.411.550,00	181.700,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			629.829.742,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional/ Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	170.987.400,00	170.987.400,00	170.987.400,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			267.581.370,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				182 Orang	182 Orang	10.632.000,00	10.632.000,00	10.632.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			122.229.197,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Prosentase ketepatan waktu penyaluran bantuan keuangan</i>				-	100 %	478.112.174.372,00	478.392.858.910,00	508.236.073.753,00	30.123.899.381,00			-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat		70.960.837.778,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah</i>				3 Laporan	3 Laporan	67.540.000,00	67.540.000,00	47.540.000,00	-20.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			38.370.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				1 Laporan	1 Laporan	371.741.835.960,00	373.380.734.498,00	395.239.260.293,00	23.497.424.333,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA DESA	-	- -			773.182.415,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	1 Laporan	24.310.973.003,00	20.952.759.003,00	18.177.448.051,00	-6.133.524.952,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			898.603.863,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	2 Laporan	81.991.825.409,00	83.991.825.409,00	94.771.825.409,00	12.780.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			69.250.681.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A				-	88 %	2.447.263.500,00	2.551.983.500,00	3.007.983.500,00	562.387.766,00							3.009.651.266,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Presentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) level A</i>				-	86 %	2.447.263.500,00	2.551.983.500,00	3.007.983.500,00	560.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		3.009.651.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	774.206.000,00	774.206.000,00	774.206.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			813.380.599,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1,00 Laporan	1,00 Laporan	313.970.000,00	313.970.000,00	272.032.000,00	-41.938.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			394.251.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	598.665.000,00	748.665.000,00	898.665.000,00	300.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			654.475.762,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	496.354.500,00	496.354.500,00	802.354.500,00	306.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			530.839.155,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				48 Orang	48 Orang	264.068.000,00	218.788.000,00	260.726.000,00	-3.342.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			616.703.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah				-	8,79 %	14.464.894.675,00	17.768.024.675,00	18.852.657.525,00	1.242.850.232,00							15.707.744.907,00			
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase PAD terhadap total pendapatan daerah				-	31 %	14.464.894.675,00	17.768.024.675,00	18.852.657.525,00	4.387.762.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		15.707.744.907,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	148.759.900,00	130.759.900,00	271.142.900,00	122.383.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			108.045.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				8 Laporan	8 Laporan	175.082.400,00	175.082.400,00	168.199.400,00	-6.883.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			138.849.375,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				86 Laporan	86 Laporan	639.098.500,00	639.098.500,00	589.098.500,00	-50.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			744.620.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																				
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				20000 Obyek Pajak	20000 Obyek Pajak	375.700.000,00	363.700.000,00	354.700.000,00	-21.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			899.210.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																				
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	360.855.000,00	356.655.000,00	457.155.000,00	96.300.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			360.855.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																				
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10000 Layanan	10000 Layanan	794.956.800,00	758.956.800,00	886.396.650,00	91.439.850,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			887.624.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																				
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				3800 Dokumen	3800 Dokumen	549.425.000,00	532.505.000,00	476.965.000,00	-72.460.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			471.896.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	8.961.781.000,00	12.361.781.000,00	12.865.778.000,00	3.903.997.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			9.414.910.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				500 Dokumen	500 Dokumen	85.535.800,00	85.535.800,00	60.719.800,00	-24.816.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			140.267.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				33 Dokumen	33 Dokumen	2.268.801.375,00	2.259.051.375,00	2.596.603.375,00	327.802.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.429.433.037,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	104.898.900,00	104.898.900,00	125.898.900,00	21.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik	- -			112.033.845,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO								3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	575.000.000,00								3.089.957.930,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	575.000.000,00							3.089.957.930,00			
	5.02	KEUANGAN							3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	575.000.000,00							3.089.957.930,00			
1.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A				-	88 %	3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	0,00							3.089.957.930,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah tertib dan teratur				-	90 %	3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	575.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		3.089.957.930,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			3.089.957.930,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL								960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00						960.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00							960.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN							960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00							960.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00							960.000.000,00	
	5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya informasi terkait dana penguatan modal				-	90 %	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		960.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	0,00	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			960.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		J U M L A H							592.016.743.067,00	590.583.495.599,00	629.100.354.332,00	216.360.323.108,00						186.876.225.581,00		

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO KAB. SLEMAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO						3.089.957.930,00							3.089.957.930,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.089.957.930,00							3.089.957.930,00	
	5.02	KEUANGAN						3.089.957.930,00							3.089.957.930,00	
1.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	3.089.957.930,00						-	3.089.957.930,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	3.089.957.930,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	3.089.957.930,00	UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	3.089.957.930,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		3.089.957.930,00	UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO
	J U M L A H							3.089.957.930,00							3.089.957.930,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SLEMAN TAHUN 2024																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO								3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	575.000.000,00							3.089.957.930,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	575.000.000,00							3.089.957.930,00		
	5.02	KEUANGAN							3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	575.000.000,00							3.089.957.930,00		
1.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A				-	88 %	3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	0,00							3.089.957.930,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah tertib dan teratur				-	90 %	3.089.957.930,00	3.664.957.930,00	3.664.957.930,00	575.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		3.089.957.930,00	UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.089.957.930,00	0,00	0,00	-3.089.957.930,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO	
		J U M L A H							3.089.957.930,00	0,00	0,00	216.360.323.108,00							0,00		

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL KAB. SLEMAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL						960.000.000,00							960.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						960.000.000,00							960.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						960.000.000,00							960.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	960.000.000,00						-	960.000.000,00	
	5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	960.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-	-	960.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
	5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				9 Unit Kerja	960.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	-		960.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
	J U M L A H							960.000.000,00							960.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SLEMAN TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL							960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00							960.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00							960.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN							960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00							960.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00							960.000.000,00	
	5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya informasi terkait dana penguatan modal				-	90 %	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		960.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
	5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	960.000.000,00	0,00	0,00	-960.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
	J U M L A H								960.000.000,00	0,00	0,00	216.360.323.108,00							0,00	

Lampiran 3:

**RKPD 2024 (batang tubuh
dan uraian target perangkat
daerah)**



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat kalurahan, kapanewon, kabupaten dan provinsi.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD merupakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, dan rancangan anggaran pembangunan dan belanja Daerah tahun 2024.

Pasal 3

RKPD berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4

Sistematika RKPD:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII PENUTUP

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2023



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 39

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						200.000.000,00							256.027.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						200.000.000,00							256.027.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (%)</i>				90	200.000.000,00							256.027.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						200.000.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			256.027.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	<i>Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (%)</i>				100		(Sleman)				100			
								200.000.000,00							256.027.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (Laporan)</i>		4.00	4.00	4.00		(KAB. SLEMAN)				4.00			
			<i>Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan Triwulan 1 (Laporan)</i>				1	50.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	Dana Keistimewaan			Kabupaten Sleman			
			<i>Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan Triwulan 2 (Dokumen)</i>				1	50.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
			<i>Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan Triwulan 3 (Dokumen)</i>				1	50.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
			<i>Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan Triwulan 4 (Dokumen)</i>				1	50.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						591.816.743.067,00							182.592.913.901,00	
	5.02	KEUANGAN						591.816.743.067,00							182.592.913.901,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)</i>				100	92.860.261.746,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		88.026.706.346,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.073.995,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			109.968.238,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu (%)</i>				100		(KAB. SLEMAN)				100			
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						53.143.720,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			100.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>		4	4	4		(KAB. SLEMAN)				4			
			<i>Dokumen Perjanjian Kinerja (Dokumen)</i>				1	5.607.930,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
			<i>Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)</i>				1	5.607.930,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
			<i>Rencana Kerja Perubahan SKPD (Dokumen)</i>				1	5.607.930,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
			<i>Rencana Kerja SKPD (Dokumen)</i>				1	36.319.930,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.762.500,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		2.953.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	2			
			Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	1.062.500,00	(Kabupaen Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman							
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	700.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.091.600,00			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	2	2.196.363,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)					Kabupaten Sleman			
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	1.391.600,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman							
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	700.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman							
							2.349.900,00			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	2	2.467.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)		Kabupaten Sleman						
		Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)			1	1.649.900,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman								
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	700.000,00	(Kabupaten Seman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupate Sleman								
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.274.900,00						Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupate Sleman	2	2.231.250,00
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				2	2	2		(KAB. SLEMAN)		Kabupate Sleman						
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)					1	1.574.900,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	700.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman							
							8.451.375,00			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	7		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		7	7	7		(KAB. SLEMAN)		Kabupaten Sleman						
	Dokumen pengendalian dan evaluasi hasil Renja (Dokumen)			1	1.260.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman									
	Dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja (Dokumen)			1	1.260.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman									
	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja (Dokumen)			1	1.260.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman									
Laporan Pelaksanaan Tugas Bulanan (Dokumen)			12	630.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman										
Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan (Dokumen)			1	630.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman										
Laporan RFK (Dokumen)			1	1.260.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman										
LKJiP (Laporan)			1	2.151.375,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Sleman										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39.447.505.951,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			39.369.040.693,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu (%)				100		(KAB. SLEMAN)					100		
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						38.719.142.751,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			38.382.105.557,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		90.00	90.00	90.00		(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	90.00		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				90	38.719.142.751,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sleman			
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						641.900.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		840.630.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	2		
			Laporan pembagian honorarium pengelola barang dan jasa (Dokumen)				1	220.260.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
			Laporan Pembagian honorarium pengelola keuangan (Dokumen)				1	421.640.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sleman			
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						86.463.200,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		146.305.136,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	2		
			Dokumen Laporan Rekonsiliasi BMD (Laporan)				2	30.495.200,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sleman			
			Dokumen SPJ per bulan/semesteran (Dokumen)				14	50.568.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
			Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)				1	5.400.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.377.741.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			-	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)				100		(KAB. SLEMAN)					100		
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.377.741.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			-	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1	1	1						Kabupaten Sleman	1		
			Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				1	1.377.741.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.163.285.400,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			2.757.205.704,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum (%)				100		(KAB. SLEMAN)					100		
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						144.289.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			218.704.158,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		6	6	6		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	6		
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				6	144.289.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
											NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	1	267.211.350,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1	200.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman								
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						780.438.400,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	1	846.254.346,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				1	780.438.400,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman								
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						350.000.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	1	313.258.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				1	350.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman								
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						155.400.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	1	163.170.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman								
			Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Bulan)				12	400.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman								
			Layanan makanan dan minuman tamu (Laporan)				1	155.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman								
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						533.158.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	1	948.607.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				1	533.158.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman								
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.500.000.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		100	2.475.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)				100		(KAB. SLEMAN)													
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.500.000.000,00											9	2.475.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		9	9	9		(KAB. SLEMAN)												
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				9	4.500.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD Kabupaten Sleman										
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						44.214.209.500,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		100	40.173.456.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah (%)				100		(KAB. SLEMAN)													
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						126.000.000,00										Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		12	171.150.000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				12	12	12		(KAB. SLEMAN)													

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				12	126.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
							43.584.060.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		39.463.263.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12		(KAB. SLEMAN)				12				
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				12	43.584.060.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
							504.149.500,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		539.043.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	12		(KAB. SLEMAN)				12				
		Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				12	504.149.500,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman					
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.087.445.900,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			3.141.335.486,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase Barang milik daerah terpelihara (%)				90		(KAB. SLEMAN)				90				
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						645.800.000,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			2.888.469.236,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		30	30	37		(KAB. SLEMAN)				37				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				37	645.800.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman					
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						231.050.000,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		242.602.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		12	12	12		(KAB. SLEMAN)				12				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				12	231.050.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman					
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						210.595.900,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		10.263.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		7	7	7		(KAB. SLEMAN)				7				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				7	210.595.900,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman					
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						482.044.323.146,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		75.826.138.132,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu (%)				100										
			Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah (%)				100						Kabupaten Sleman				
			Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD (%)				100						Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						2.384.720.800,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			2.943.441.120,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu (%)				100		(KAB. SLEMAN)				100				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						210.595.900,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			371.607.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)				2			
			Dokumen KUA tahun n+1 (Dokumen)				1	54.159.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
			Dokumen PPAS tahun n+1 (Dokumen)				1	156.436.900,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						146.696.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		220.614.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)				2			
			Dokumen Perubahan KUA tahun n (Dokumen)				1	78.684.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
			Dokumen Perubahan PPAS tahun n (Dokumen)				1	68.012.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						12.405.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		19.333.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		75	75	75		(KAB. SLEMAN)				75			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)				75	12.405.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						12.405.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		19.333.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		75	75	75		(KAB. SLEMAN)				75			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)				75	12.405.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						43.950.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		66.303.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		75	75	75		(KAB. SLEMAN)				75			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)				75	43.950.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						17.823.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		40.053.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		75	75	75		(KAB. SLEMAN)				75			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)				75	17.823.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						1.315.806.200,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		1.570.120.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)				2			
			Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD (Dokumen)				1	657.903.100,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
			Peraturan Daerah tentang APBD (Dokumen)				1	657.903.100,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						113.689.200,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		156.077.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)				2			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Perubahan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran APBD (Dokumen)				1	56.844.600,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
			Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD (Dokumen)				1	56.844.600,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
								511.350.500,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		480.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)		3	3	3		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	3			
			Dokumen ASB (Dokumen)				1	200.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
			Dokumen SHBJ (Dokumen)				1	200.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
			Revisi Peraturan Bupati (Dokumen)				1	111.350.500,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						778.845.724,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			814.299.275,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah (%)					100		(KAB. SLEMAN)					100				
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						87.291.000,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			93.356.550,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)					1			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)				1	87.291.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						167.149.150,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		180.127.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	2			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)				2	167.149.150,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						72.890.900,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	1			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)				1	72.890.900,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						266.884.674,00					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		309.759.975,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)		12	12	12		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	12			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)				12	266.884.674,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						46.130.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		55.130.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)		12	12	12		(KAB. SLEMAN)			Kabupaten Sleman	12			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)				12	46.130.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					138.500.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		50.925.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)		12	12	12		(KAB. SLEMAN)			Kabupaten Sleman	12			
			Berita acara rekonsiliasi SP2D (Dokumen)				12	138.500.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					768.582.250,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			1.107.559.959,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD (%)				100		(KAB. SLEMAN)				100			
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					74.733.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			87.919.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)				1			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)				1	74.733.000,00	(KAbupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					512.229.850,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		629.829.742,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)				1	1	1		(KAB. SLEMAN)			Kabupaten Sleman	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan P (Dokumen)				1	512.229.850,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
								170.987.400,00					Kabupaten Sleman			
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	1	267.581.370,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)				1	170.987.400,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
								10.632.000,00					Kabupaten Sleman		122.229.197,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		150	160	182		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	180		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)				182	10.632.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						478.112.174.372,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			70.960.837.778,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan (%)				100		(KAB. SLEMAN)				100			
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah						67.540.000,00							38.370.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)		3	3	3		(KAB. SLEMAN)				3			
			Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)				3	67.540.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						371.741.835.960,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		773.182.415,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)			Kabupaten Sleman	1			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)				1	371.741.835.960,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						24.310.973.003,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		898.603.863,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)		1	1	1		(KAB. SLEMAN)			Kabupaten Sleman	1			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)				1	24.310.973.003,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						81.991.825.409,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		69.250.681.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)			Kabupaten Sleman	2			
			Laporan Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa (Laporan)				1	77.991.825.409,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
			Laporan Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa (Dokumen)				1	4.000.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						2.447.263.500,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			3.009.651.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase perangkat Daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A (%)</i>				86						Kabupaten Sleman			
4.	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Presentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) level A (%)</i>				88	2.447.263.500,00	(KAB. SLEMAN)			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		90	3.009.651.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)</i>		1	1	1	774.206.000,00	(KAB. SLEMAN)			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		1	813.380.599,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)</i>				1	774.206.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>		1.00	1.00	1.00	313.970.000,00	(KAB. SLEMAN)			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	1.00	394.251.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)</i>				1	313.970.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>		1	1	1	598.665.000,00	(KAB. SLEMAN)			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	1	654.475.762,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>				1	598.665.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)</i>		1	1	1	496.354.500,00	(KAB. SLEMAN)			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	1	530.839.155,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)</i>				1	496.354.500,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)</i>		48	48	48	264.068.000,00	(KAB. SLEMAN)			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	48	616.703.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)</i>				48	264.068.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten Sleman				
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah (%)</i>				86	14.464.894.675,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		15.730.418.157,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						14.464.894.675,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			15.730.418.157,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			<i>Presentase PAD terhadap total pendapaan daerah (%)</i>				33		(KAB. SLEMAN)					34		
			<i>Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah (%)</i>				80		(KAB. SLEMAN)					80.1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						148.759.900,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	2	108.045.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)		2	2	2		(KAB. SLEMAN)							
			Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah (Dokumen)				1	74.379.950,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Dokumen Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)			1	74.379.950,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						175.082.400,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	8	138.849.375,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)		8	8	8		(KAB. SLEMAN)							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)			8	175.082.400,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						639.098.500,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	86	744.620.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)		86	86	86		(KAB. SLEMAN)							
			Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)			86	639.098.500,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						375.700.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	20000	899.210.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)		20000	20000	20000		(KAB. SLEMAN)							
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek)					20.000	375.700.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						360.855.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	667000	383.528.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)		667000	667000	667000		(KAB. SLEMAN)								
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)			667.000	360.855.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						794.956.800,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	10000	887.624.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)		10000	10000	10000		(KAB. SLEMAN)								
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)			10.000	794.956.800,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						549.425.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	3800	471.896.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)		3800	3800	3800		(KAB. SLEMAN)								
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)			3.800	549.425.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						8.961.781.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	12	9.414.910.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)		12	12	12		(KAB. SLEMAN)								

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)				12	8.961.781.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
								85.535.800,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		140.267.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)		500	500	500		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	500			
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)				500	85.535.800,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
								2.268.801.375,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		2.429.433.037,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)		33	33	33		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	33			
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)				33	2.268.801.375,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
								104.898.900,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman		112.033.845,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)		12	12	12		(KAB. SLEMAN)				Kabupaten Sleman	12			
			Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)				12	104.898.900,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman				
	JUMLAH							592.016.743.067,00								182.848.940.901,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.089.957.930,00							3.089.957.930,00	
	5.02	KEUANGAN						3.089.957.930,00							3.089.957.930,00	
1.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase perangkat Daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A (%)</i>				90	3.089.957.930,00							3.089.957.930,00	UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Laporan barang milik daerah tertib dan teratur (%)</i>				90	3.089.957.930,00	(KAB. SLEMAN)					90	3.089.957.930,00	UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)</i> <i>Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>		12	12	12	3.089.957.930,00	(KAB. SLEMAN)			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Sleman	12	3.089.957.930,00	UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO
	JUMLAH							3.089.957.930,00							3.089.957.930,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						960.000.000,00							960.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						960.000.000,00							960.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu (%)				100	960.000.000,00							960.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
	5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						960.000.000,00							960.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
			Terpenuhinya informasi terkait dana penguatan modal (%)				90		(KAB. SLEMAN)					90		
	5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						960.000.000,00				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			960.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		9	9	9		(KAB. SLEMAN)					9		
			Laporan Dana Penguatan Modal (Laporan)				12	960.000.000,00	(Kabupaten Sleman, KAB. SLEMAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Sleman			
	JUMLAH							960.000.000,00							960.000.000,00	